

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 20

TAHUN

Proyek Sarulla Molor

JAKARTA – Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla di Tapanuli, Sumatera Utara, dipastikan molor dari jadwal awal 2009. Hingga saat ini konsorsium PT Medco Energi Internasional Tbk dan mitranya belum final menyiapkan dokumentasi yang diperlukan seperti kontrak energi, *joint operating comitee*, dan kontrak *engineering, procurement, dan construction* (EPC).

Sumber *Investor Daily* di Medco mengakui, hingga kini konsorsium yang menggarap proyek ini, yaitu Medco dan dua perusahaan asal Jepang, yaitu Itochu serta Kyushu Electric Power dan Ormat International dari Israel, belum menandatangani kontrak EPC. "Kami belum menyelesaikan *financial closing* soal estimasi investasi yang dibutuhkan," katanya di Jakarta, Rabu (16/7).

Sumber mengatakan, proyek tersebut baru bisa dijalankan setelah 30 bulan proses *financial closing* selesai dilakukan. Sumber menambahkan, Japan

Bank for International Cooperation (JBIC) yang berkomitmen mendanai proyek ini, sampai sekarang belum memastikan apakah akan memberi pinjaman dana atau tidak. "Mereka masih menunggu EPC selesai," jelasnya.

Direktur Produksi Medco Energi Lukman Mahfoedz mengatakan, pembangunan PLTP Sarulla telah memasuki tahap *engineering*. Dia optimistis, jika tidak halangan proyek tersebut sudah bisa beroperasi pada 2010.

Sebelumnya, Komisaris Utama Medco Hilmi Panigoro menjelaskan, PLTP Sarulla dijadwalkan mulai dibangun awal 2009. Pada tahap awal, konsorsium Medco akan membangun pembangkit berkapasitas 110 megawatt (MW) dari total 340 MW yang akan dikembangkan.

JBIC rencananya menanggung biaya sekitar 70% dari total investasi, atau sekitar US\$ 560 juta. Sisanya sebanyak US\$ 240 juta berasal dari asumsi ekuitas. (her)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 20

TAHUN

Investor Daily/ist



Proyek PLTU Indramayu
Seorang petugas memeriksa peralatan yang digunakan untuk pembangunan Proyek PLTU 1 Jawa Barat - Indramayu 3 x 300 MW di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Rabu (16/7). Kehadiran proyek ini sebagai antisipasi kenaikan kebutuhan tenaga listrik untuk Jawa-Bali. Untuk Unit 1 dijadwalkan selesai dibangun dalam 30 bulan dan beroperasi pada September 2009, sedang Unit II dan III pada Desember 2009. Ditargetkan pada Maret 2010 secara keseluruhan proyek selesai dalam waktu 36 bulan.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 20

TAHUN 20

PLTN Prioritas di Jawa

JAKARTA – Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 4.000 megawatt (MW) di Pulau Jawa. Proyek tersebut diharapkan terealisasi pada 2015.

“Selain mengatasi pertumbuhan permintaan listrik yang mencapai 60% di Pulau Jawa, PLTN juga mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil,” ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Teknologi dan SDM Evita H Legowo di Jakarta, Rabu (16/7).

Sebelumnya diberitakan, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) mengkaji kemungkinan pembangunan PLTN berkapasitas 4X1.000 MW di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Namun, rencana pengembangan pembangkit nuklir itu terkendala adanya penolakan dari masyarakat.

Evita mengungkapkan, PLTN menggunakan bahan bakar yang relatif lebih sedikit, namun

menghasilkan energi listrik lebih besar dibanding pembangkit berbahan bakar fosil atau energi terbarukan. Untuk membangun PLTN berkapasitas 1.000 MW dibutuhkan uranium sekitar 33 ton per tahun. Jika satu gram ²³⁵U (isotop uranium yang dapat ‘membelah’) uranium bereaksi, ia dapat menghasilkan energi setara 1 MW atau 3,2 ton batubara.

Untuk kapasitas yang sama, lanjut Evita, pembangkit listrik berbahan bakar minyak memerlukan sekitar 10 juta barel. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap membutuhkan 2,1 juta ton batubara, pembangkit listrik tenaga gas mengonsumsi 64 miliar kaki kubik gas, dan pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan areal 25 ribu hektare.

Berdasarkan kajian tim teknis yang terdiri atas Departemen ESDM, Badan Pengawas Pengembangan Teknologi Nuklir (Bapeten), Batan, dan PT PLN terdapat 14 lokasi di Indonesia yang layak untuk PLTN. (c122)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 6

TAHUN

KRISIS LISTRIK

PLN Jateng-DIY Lebih Selektif

SOLO (Suara Karya): PT PLN Distribusi Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menahan pertumbuhan pelanggan baru listrik di wilayahnya. Ini sebagai salah satu upaya untuk penghematan penggunaan energi listrik. Hingga saat ini ada 200.000 pelanggan baru yang sudah mendaftar ke PLN untuk mendapatkan sambungan listrik. Sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga dan sekitar 500 di antaranya industri.

"Kalau untuk menghentikan sambungan baru jelas tidak mungkin. Sebab, saat ini masih ada 40 persen masyarakat yang belum mendapatkan aliran

listrik. Yang bisa kami lakukan adalah menekan pertumbuhannya," kata *General Manager* PT PLN Distribusi Jateng-DIY Ari Agus Salim kepada wartawan di Solo, Rabu (16/7).

Meskipun pelanggan baru untuk industri lebih kecil dibanding dengan pelanggan baru dari kalangan rumah tangga, penggunaan energi listrik industri jauh lebih besar. "Sebenarnya tidak masalah, sebab kami masih punya sisa daya listrik untuk pelanggan baru dari industri," katanya lagi.

Pada saat beban puncak, penggunaan energi listrik di Jateng bisa mencapai 16.995 megawatt (MW). Dan hal ini terjadi

pada malam hari, terutama dari pelanggan rumah tangga. Pada saat beban puncak ini kemampuan cadangan margin mencapai 12 persen. Padahal seharusnya mencapai 40 persen.

Ini disebabkan kekurangan daya pembangkit yang disebabkan pasokan bahan bakar berkurang. Untuk mengendalikan kemampuan penyediaan aliran listrik itu, saat ini pihaknya melakukan subsidi silang dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan, maka kemampuan cadangan bisa mencapai 14 persen pada tahun 2009 mendatang.

Sementara itu, Manajer

PT PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Solo, Wahjono, mengatakan, pertumbuhan pelanggan baru PLN di wilayah Surakarta mencapai 10 persen.

Saat ini telah tercatat sebanyak 980.000 pelanggan PLN dan hampir 94 persennya merupakan pelanggan rumah tangga. Sedangkan hingga saat ini terdapat 2.000 pelanggan baru yang mendaftar untuk memperoleh sambungan listrik.

"Pelanggan baru itu ada beberapa yang berasal dari industri. Target sambungan baru memang terlampaui, tapi konsekuensinya risiko operasional juga tinggi," ucapnya.

(Endang Kusumastuti)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

HALAMAN : 13

TAHUN

Cooperation sought in nuclear plans

Alfian

The Jakarta Post/Jakarta

The government is considering offering incentives for regions that allow part of their area to be used as a site for nuclear power plants.

Evita H. Legowo, an expert adviser at the Energy and Mineral Resources Ministry, said the concept was being formulated by a working team for nuclear power plants under the ministry.

"Any regional administration that allows part of its area to be used for nuclear power plants would receive incentives. It could be that we build hospitals or schools for them," said Evita, who was speaking at a seminar

about the investment climate in the energy and mining sector Wednesday.

She added that the concept was still just an idea among the team members and had been communicated verbally to the Energy and Mineral Resources Ministry.

Evita said opposition from local communities had been a major problem in developing nuclear power plants.

One such project was the planned development of a nuclear power plant in Muria Peninsula in Central Java, which stalled because of community opposition.

"The government had invested a lot in this project, including creating a nuclear engineering major at the Gadjah Mada University. But, as the project has not

made any progress, many of these nuclear engineers have to work in other fields," Evita said.

The Muria plant was expected to start operating in 2016 and to supply between 4,000 and 6,000 megawatts of electricity to Java and Bali.

Evita said cooperation with local governments in building nuclear power plants had been practiced in other nations, including France and Japan.

Indonesia needs 10 nuclear reactors, each of which has a capacity of 1,000 megawatts of electricity, she said.

"We will need about three power plant sites because each site could have three reactors producing about 4,000 megawatts."

6

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN: 17

TAH

Pengusaha Keluhkan Proyek Galian PLN

DEPOK — Sejumlah pengusaha yang beroperasi di Jalan Raya Cinere, Depok, mengeluhkan pengerjaan proyek galian PLN. Pasalnya, proyek galian sepanjang 500 meter di sisi kiri jalan itu tertutup seng setinggi dua meter sehingga tempat usaha mereka tak terlihat pengunjung.

Akibat penutupan seng itu, omzet para pedagang di lajur ini menurun hingga 50 persen. "Sebelumnya, saya *nggak* tahu kalau mau ada galian PLN," kata Lukmanto, pengusaha furnitur di lajur ini, Rabu (16/7).

Sejumlah konsumen yang biasanya memarkir kendaraan di depan tokonya pun mengeluh karena areal parkir tersita proyek galian. Jalan di depan tokonya disisakan sekitar 1,5 meter membuat lahan yang biasanya dijadikan lahan parkir menjadi sempit. Jalan masuk ke toko yang tidak tepat berada di depan toko membuat sejumlah pembeli enggan masuk. Lukmanto pun berharap galian PLN tersebut bisa selesai secepatnya agar usahanya dapat kembali berjalan lancar.

Kondisi serupa dialami Yenti, pemilik bengkel Agung Baru. Bengkel khusus kendaraan roda empat ini mengaku omzetnya menurun sejak ada galian PLN sekitar tiga minggu lalu.

Salah satu pegawai bengkel Pulung Motor, Bayu, mengatakan bahwa jumlah unit kendaraan biasanya sampai memenuhi bengkel tersebut pada siang hari, namun kemarin bengkel tampak kosong. Sejumlah pekerja pun tak melakukan aktivitas perbaikan seperti biasanya. "Padahal, sehari-hari biasanya bengkel ramai," pungkas Bayu. Kapasitas bengkel tersebut setidaknya dapat menampung sekitar enam unit kendaraan roda empat.

Selain memengaruhi sejumlah tempat usaha, galian tersebut juga mempersempit lajur Jalan Raya Cinere menjadi hanya satu lajur. Sejumlah kendaraan roda empat dan motor pun harus rela antre untuk masuk ke satu lajur yang tersisa.

Salah satu pengendara motor, Andri, mengatakan bahwa penyempitan lajur membuat keadaan Jalan Raya Cinere menjadi semakin macet. "Sebelumnya, motor *kan* bisa lewat lajur yang paling kiri, tapi sekarang *musti* gantian sama mobil," kata Andri.

Menurut seorang pekerja galian, Khotib, pekerjaan tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk satu galian. "Pekerjaan galian di sini setidaknya sudah tujuh bulan," kata Khotib.

Namun, meski jalan wilayah tersebut masuk wilayah Depok, pelayanan listriknya tidak termasuk dalam area pelayanan PLN Kota Depok. Saat *Republika* mengonfirmasi ihwal galian tersebut, Humas PLN Depok, Setiabudi, mengatakan bahwa galian tersebut bukan termasuk dalam pemeliharaan PLN Depok. "Saya sudah tanya bagian pemeliharaan PLN Depok, tidak ada galian yang dilakukan pihak kami. Galian tersebut mungkin bagian dari PLN Cinere, Jakarta Selatan," kata Setiabudi. ■ c67

7

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN: 4

TAH

Defisit Listrik Teratasi Pemadaman di DKI Batal

PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengklaim sudah berhasil mengatasi defisit listrik. Rencana pemadaman bergilir pun dianulir.

Manajer Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Sampurno mengatakan hal itu, kemarin. "Karena partisipasi masyarakat menghemat listrik, hasilnya sangat signifikan. Sekarang sudah tidak ada defisit lagi," ujarnya.

Menurut Sampurno, pihaknya sudah memelopori langkah penghematan yang diterapkan di seluruh kantor pelayanan PLN di Jakarta dan Tangerang. "PLN Jakarta yang lebih dulu melakukan penghematan," klaimnya.

Sebelumnya, PLN menyatakan pasokan listrik defisit 150 megawatt (Mw). Untuk mengantisipasinya, sempat direncanakan pemadaman bergilir selama 7 jam hingga 25 Juli mendatang.

Sementara itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo meminta PLN untuk menghitung ulang konsumsi listrik saat ini. Karena, dengan penghematan listrik yang telah dilakukan seluruh gedung-gedung di DKI saat ini, mestinya defisit sudah bisa ditekan. "Saya pikir kalau mereka (PLN) melakukan hitung-hitungan, pasti sudah ada penurunan defisit listrik," jelasnya di Balai Kota, kemarin. Apabila defisit memang bisa diantisipasi, kata Fauzi, pengalihan jam kerja yang selama ini diributkan bisa dihindari.

Terkait dengan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang penghematan listrik, Fauzi menilai hal itu bisa berimbas ke sektor ekonomi daerah. "Pemindahan jam kerja bisa mengganggu produksi perusahaan. Risikonya, secara tidak langsung akan sangat berpengaruh pada perekonomian Jakarta," katanya.

Karena itu, Gubernur mengharapkan implementasi SKB tersebut dapat mengakomodasi semua kebutuhan para pengusaha sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan. "Harapan saya sih begitu. Sebab kebijakan SKB belum dikasih tahu resmi ke saya. Kami mau bilang apa karena enggak diajak ngomong," sesalnya.

Untuk itulah, Fauzi memerintahkan dinas tenaga kerja untuk berkoordinasi dengan seluruh perusahaan yang ada di DKI. Dampak lainnya adalah berkurangnya pendapatan dari sektor pajak. "Ya pasti ada pengaruhnya ke sana (pajak) walaupun tidak terlalu besar," ujarnya. (BT/J-2)

8

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 25

TAHUN

BBM

Krisis Listrik Picu Kelangkaan Bahan Bakar

BANJARMASIN (MI): Krisis listrik diperkirakan memicu terjadinya pembengkakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) oleh masyarakat dan industri. Kondisi itu ditandai meningkatnya antrean pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan melambungnya harga di tingkat eceran.

Kepala Pertamina Unit Pemasaran IV wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel-Kalimantan Tengah (Kalteng), Budi Busama, kemarin, mengatakan hal itu di depan unjuk rasa puluhan warga di Kantor Pertamina Banjarmasin.

Menurut dia, krisis listrik yang membuat masyarakat dan industri menggunakan *genset* telah berimbas pada permintaan BBM yang tinggi. Kebutuhan rata-rata premium per hari di Kalsel berdasarkan kuota mencapai 800 kl dan solar mencapai 1.600 kl per hari. Munculnya antrean panjang di SPBU dalam tiga bulan belakangan, ia menegaskan, telah membuat Pertamina menambah pasokan 15% dari kebutuhan.

Di Pontianak, Kalimantan Tengah, kelangkaan BBM sejak tiga hari belakangan telah menyebabkan para sopir angkutan kota (angkot) kesulitan memperoleh bahan bakar.

Mat Dwi, 37, sopir angkot jurusan Seroja-Kom Yos Sudarso, mengaku terpaksa antre berjam-jam untuk mendapatkan premium. "Walaupun tidak *narik* seharian, saya tetap membayar setoran ke tauke (pemilik angkot) sebesar Rp100 ribu sehari. Tauke saya tidak mau tahu, pokoknya setiap hari harus ada setoran, kecuali kalau angkotnya rusak dan harus ke bengkel," katanya, kemarin.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kelangkaan BBM mengakibatkan harga jual di eceran melonjak menjadi Rp20 ribu per liter. Kelangkaan tersebut dipicu keterlambatan tanker pengangkut BBM, Puteri Jelita.

Sementara itu, aparat Patroli Jalan Raya (PJR) Unit III Purwokerto Polda Jawa Tengah menangkap mobil minibus yang mengangkut 500 liter minyak tanah. (DY/AR/PO/LD/N-1)

10

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN: 25

TAHU

PLN

Biarpet, Layanan Air Bersih Terganggu

SURABAYA (MI): Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN tidak hanya berdampak pada masyarakat. Pengadaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, Jawa Timur, juga terganggu.

"Pemadaman bergilir membuat distribusi air bersih dengan sistem pompanisasi untuk 300 ribu pelanggan di Surabaya terhambat. Proses penjernihan air juga terganggu," kata Humas

PDAM Surabaya Sunarno, kemarin.

Saat ini, PDAM hanya memiliki *genset* untuk instalasi penjernihan air minum di kawasan Ngagel I, II, dan III. Instalasi lain, PLN hanya mampu menyediakan 50% kebutuhan listriknya.

Pemadaman bergilir setengah jam membuat pendistribusian air terlambat hingga 2-3 hari. Dampak lain, kualitas air yang dihasilkan masih keruh.

"Kami mencoba mendekati PLN untuk tidak terkena pemadaman bergilir. Ke depan, PDAM berencana berinvestasi membangun pembangkit listrik sendiri," tutur Sunarno.

Pemadaman bergilir juga menjadi kendala besar bagi industri kecil di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain jadwal produksi terganggu, pelaku usaha merugi karena alat produksi mereka rusak.

"Alat produksi jadi rusak karena tidak stabilnya pasokan listrik. Banyak pelaku industri rumah tangga yang menyalahkan keluhan kepada kementerian Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Yahya.

Industri yang paling banyak menderita kerugian adalah sektor yang berbahan kayu seperti mebel, desainer, pakaian jadi, kerajinan lainnya. (FL/AU/)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 17

TAHUN

Industri Beralih Mulai 31 Juli 2008

Pelaku Usaha Mengeluhkan Langkah Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS – PT Perusahaan Listrik Negara menjadwalkan pengalihan waktu kerja bagi industri ke Sabtu dan Minggu dimulai tanggal 31 Juli 2008.

Perseroan menyatakan pihaknya membutuhkan waktu, baik untuk mengatur jadwal pengalihan maupun sosialisasi kepada industri di Jawa yang akan terkena.

Demikian dikemukakan Direktur PT PLN untuk Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin, Rabu (16/7) di Jakarta. Meskipun pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) lima menteri menargetkan pengalihan mulai efektif pada 21 Juli 2008, dibutuhkan perencanaan sebelum keputusan itu bisa diimplementasikan.

PLN berencana mengelompokkan industri kategori I3 (daya tersambung lebih dari 200 kVA) dan I4 (daya tersambung lebih dari 30.000 kVA) yang ada di Jawa ke dalam 12 kluster.

"Basisnya bukan wilayah, tetapi kelompok industri yang kalau digabung total dayanya mencapai 600 megawatt. Jadi, satu kluster itu terdiri dari beberapa industri yang wilayahnya tersebar bisa di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," papar Murtaqi.

Apabila satu kluster dijadwalkan pemadaman, hari itu mereka tidak bekerja dan dialihkan ke hari Sabtu atau Minggu sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan.

daerah.

PLN mencatat di seluruh Jawa jumlah industri kategori I3 dan I4 mencapai 6.888 perusahaan. Murtaqi mengatakan, pihaknya akan memilah lagi industri-industri tersebut.

Sesuai dengan kategori dalam SKB, pengecualian berlaku untuk industri yang beroperasi 24 jam sehari selama tujuh hari seminggu atau bekerja penuh tujuh hari seminggu.

Tambahan subsidi

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR kemarin, PLN menyampaikan kebutuhan subsidi listrik tahun ini mencapai Rp 89,3 triliun.

Dengan tambahan itu, ada defisit Rp 26,8 triliun dari alokasi subsidi Rp 62,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008.

Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy, mengatakan, usulan tambahan subsidi sudah disampaikan pemerintah ke Panitia Anggaran.

Namun, ia mengusulkan agar

untuk menekan subsidi, termasuk kemungkinan penerapan tarif dasar listrik nonsubsidi.

Dirut PT PLN Fahmi Mochtar mengatakan, uji coba penerapan tarif nonsubsidi kepada pelanggan rumah tangga di atas 6.600 VA menunjukkan bahwa pelanggan sebenarnya mampu membayar dengan tarif nonsubsidi.

Sementara itu Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, pelaku usaha menyangkan langkah pemerintah yang lebih mengedepankan soal sanksi kepada industri yang tidak menaati SKB, dengan ancaman pemadaman atau pencabutan pasokan listrik.

"Kadin meminta pemerintah mengeluarkan peraturan atau keputusan menteri yang juga mengatur sanksi terhadap buruh yang menolak pengalihan hari kerja pada Sabtu atau Minggu. Sanksi juga harus dilakukan terhadap buruh yang mendesak uang lembur pada pengalihan hari kerja itu," papar Bambang.

Kadin mengharapkan pendekatan yang lebih mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi. Tidak perlu mengorbankan industri secara pukol rata dengan penggeseran jadwal kerja.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit mengatakan, pengusaha butuh kepastian pemerintah

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 20

TAHUN



Tajuk RENCANA

Penolakan SKB

Lepas dari masalah pro-kontra serta penolakan dunia usaha dan buruh atas SKB lima menteri, kita melihat tampaknya memang ada sesuatu yang tidak "nyambung" di antara kedua kepentingan.

GONJANG-GANJING soal surat keputusan bersama (SKB) lima menteri yang mengatur pengalihan waktu kerja sektor industri, terus menyeruak. Pro-kontra seputar upaya penghematan energi listrik yang gencar dilakukan pemerintah pun semakin sengit. Bahkan bagi kalangan pengusaha, munculnya SKB lima menteri dipandang sebagai langkah panik pemerintah di tengah kondisi usaha yang tidak begitu menguntungkan saat ini.

Boleh jadi, apa yang dilontarkan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP-BUMN) Bersatu benar adanya. Oleh karena itu, FSP-BUMN bersikeras untuk tetap menolak SKB lima menteri, dengan alasan melanggar Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, pemerintah melalui Menakertrans, Erman Suparno tetap pada pendiriannya bahwa sejauh ini tidak ada aturan ketenagakerjaan yang dilanggar dengan adanya SKB. Yang diubah hanya hari libur, yakni dari hari Sabtu-Minggu menjadi Senin-Selasa. Jadi, dalam implementasinya dinilai relatif tak ada yang dirugikan, kecuali menyesuaikan diri terkait krisis energi listrik di dalam negeri.

Berbagai pertanyaan pun muncul seputar masalah masuknya hari Sabtu dan Minggu yang notabene sebagai hari libur resmi, maka akan dianggap sebagai lemburkah atau sebagai hari kerja biasa? Belum lagi soal jaminan angkutan bagi pekerja di hari Sabtu dan Minggu. Harus kita akui, berdasarkan kacamata pengusaha memang itulah adanya. Mereka akan senantiasa memperhitungkan untung dan rugi, termasuk efektif tidaknya bagi kelangsungan usahanya.

Jika sesuatu kebijakan termasuk penerapan SKB lima menteri pada akhirnya akan menimbulkan kerugian baik bagi pekerja maupun pengusaha sendiri, tentunya mereka -- pengusaha -- tak akan begitu saja menerima. Terlebih, langkah penghematan energi listrik lewat pengalihan waktu kerja sektor industri dinilainya sebagai upaya yang tidak efektif.

Persoalan krisis energi listrik memang tidak hanya terjadi pada tahun ini. Hanya, krisis energi listrik tahun ini kecenderungannya semakin parah, akibat meningginya harga bahan baku primer (batubara dan bahan bakar minyak - BBM) yang digunakan PLN.

Lepas dari masalah pro-kontra serta penolakan dunia usaha dan buruh atas SKB lima menteri, kita melihat tampaknya memang ada sesuatu yang tidak "nyambung" di antara kedua kepentingan. Di satu sisi, dunia usaha senantiasa memperhitungkan untung dan rugi dalam setiap perlakuannya. Sementara dari sisi pemerintah, sebagai satu upaya mengatur penghematan energi listrik nasional, yang kini tengah dilanda krisis.

Hanya kesamaan pandangan yang bisa menyatukan kedua kepentingan, disertai toleransi dengan meminimalkan kerugian kedua pihak. Jangan sampai, SKB itu muncul cermin kekhilafan pemerintah atau juga "kesalahan" industri, sementara tanpa disadari masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya.***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 4

TAHUN



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : T1

TAH

Industri pelanggan listrik dibagi 12 klaster

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Sekitar 6.888 industri pelanggan besar listrik di Jawa akan dibagi ke dalam 12 klaster yang menentukan jadwal pengalihan waktu kerja sebagai implementasi dari aturan bersama lima menteri tentang pengalihan waktu kerja.

Pembagian industri dalam 12 klaster itu akan menjadi basis penentuan pengalihan hari kerja dari tiap-tiap perusahaan. Kendati aturan bersama itu dinyatakan berlaku efektif per 21 Juli, implementasi diperkirakan berlaku efektif pada 31 Juli.

Direktur Jawa Madura Bali PT Perusahaan Listrik Negara (persero) Murtaqi Syamsudin mengatakan pembagian klaster akan berbasis pada besaran daya terpasang. Di mana satu klaster merupakan kelompok industri dengan kapasitas daya terpasang sebesar 600 MW.

Satu klaster, katanya, akan terdiri dari industri heterogen yang diambil dari empat wilayah di Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

"Misalnya ambil dari Jawa Barat 10 perusahaan, di DKI Jakarta lima perusahaan, dan daerah lain berapa, sampai terkumpul total 600 MW itu menjadi satu klaster. Kriteria industrinya pokoknya yang punya waktu kerja Senin-Jumat atau Senin-Sabtu dan diidentifikasi sebagai pelanggan golongan I3 dan I4," jelas Murtaqi kemarin.

Pengalihan itu, katanya, tidak berlaku untuk industri yang sudah beroperasi 24 jam dalam seminggu.

Menurut dia, industri yang diidentifikasi memenuhi kriteria itu sebanyak 6.888 perusahaan dengan total daya terpasang sebesar 8.500 MW.

Identifikasi industri berikut penentuan jadwal pengalihan, katanya, akan ditentukan dalam pekan ini untuk disosialisasikan kepada industri mulai pekan depan.

Menurut Murtaqi, pembagian 12 klaster itu untuk memudahkan rotasi pengalihan kerja yang bertujuan untuk pemerataan beban itu. Satu klaster, tuturnya, waktu pengalihan kerjanya tidak akan sama dalam setiap bulannya.

"Misalnya klaster 1, libur dialihkan ke Senin, terus berturut-turut klaster-klaster selanjutnya libur di hari berikutnya. Sampai di klaster 1 pada putaran kedua, belum tentu klaster 1 itu akan libur pada Senin juga."

Dia mengaku perubahan yang dinamis terhadap ritme kerja itu tidak akan berdampak negatif bagi industri, dengan catatan jadwal sudah disepakati dan ditetapkan bersama. "Setiap klaster jelas jadwalnya, dia hanya kena pengalihan tanggal sekian, dan bisa bergeser pada waktu sekian."

Murtaqi mengatakan kendati waktu efektif dalam peraturan itu ditetapkan 21 Juli, implementasinya akan diun-

durkan selama kurang lebih 10 hari sesudahnya.

Hal itu, katanya, untuk memberikan waktu bagi pemerintah daerah mengeluarkan keputusan jadwal dan mensosialisasi jadwal itu kepada industri di daerahnya. "31 Juli itu kami rasa yang paling realistis. Namun, bukan berarti kami tidak mengikuti SKB," jelasnya.

Mengenai reaksi buruh, lanjut Murtaqi, hal itu merupakan tanggung jawab industri yang sudah berkomitmen untuk mengomunikasikan ketetapan tersebut kepada kalangan buruh di tiap-tiap perusahaan.

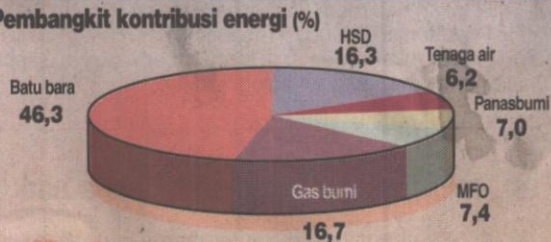
"Kalau ada komplikasi masalah dengan buruh, itu diserahkan kepada masing-masing industri untuk berkomunikasi karena itu komitmen mereka," ujarnya.

Iklm investasi

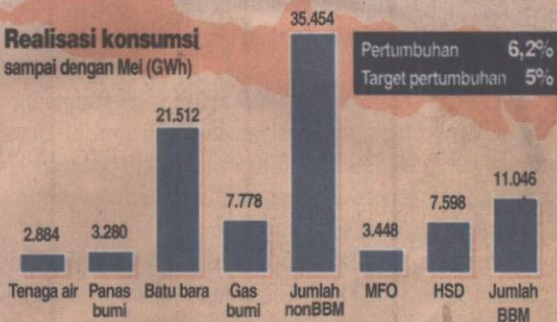
Kepala BKPM M. Lutfi mengatakan kenaikan tarif untuk industri sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah besar, terkait dengan tingkat kompetisi iklim investasi Indonesia di kawasan.

Realisasi sistem Jawa Bali 2008

Pembangkit kontribusi energi (%)



Realisasi konsumsi sampai dengan Mei (GWh)



BISNIS/ADI PURDIYANTO

Dia mendasarkan pendapat itu pada tingkat tarif yang berlaku di kawasan Asean, di mana disebutkan ada yang sudah menerapkan tarif US\$0,19 sen per kWh. "Sedangkan kita kan hanya US\$0,07 sen per kWh. Saya rasa dinaikkan pun tetap kompetitif," jelasnya.

Hal itu juga diakui oleh Murtaqi, yang menyebutkan tarif listrik PLN sebenarnya masih di level paling bawah di antara negara sesama Asean. Industri sendiri, katanya, pada prinsipnya sudah menunjukkan kesadaran bahwa besaran biaya pokok produksi (BPP) dan tarif sudah mengkhawatirkan.

(rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAH

Lokasi 3 PLTN akan ditenderkan

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah berencana melakukan tender kepada pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditargetkan sekitar tiga lokasi dengan kapasitas pembangkit sebesar 10.000 MW.

Sebelum menetapkan tiga lokasi definitif, pemerintah akan memilih 12 lokasi alternatif. Tiga daerah yang menyatakan diri menerima wilayahnya dijadikan lokasi pengembangan, dijanjikan diberikan berbagai insentif.

Staf Ahli Menteri ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan tender itu strategi baru pemerintah setelah gagal melakukan pendekatan untuk memperoleh penerimaan publik terhadap PLTN, seperti di Muria.

Sebab, kata Evita, masalah utama dari terus gagalnya implementasi rencana yang sudah ditetapkan sejak 1980-an itu adalah penerimaan publik.

"Banyak orang bilang perlu PLTN, tetapi mereka tidak mau PLTN itu ada di halamannya. Pemerintah capek, dan sudah terlalu banyak mengeluarkan uang, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh dengan terus merayu-rayu masyarakat," jelasnya kemarin.

Dengan perubahan strategi itu, katanya, diharapkan resistensi masyarakat tidak lagi terjadi. "Pemda yang mau ditempati PLTN, akan diberi insentif seperti pembangunan pasar, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya."

Namun, Evita mengatakan pemerintah belum secara resmi mengumumkan rencana itu dan hingga kini masih dalam tahap pematangan oleh tim kerja interdep.

Selain itu, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menetapkan metode yang dinilai berhasil di Jepang dan Korea Selatan itu.

Menurut dia, penentuan jumlah lokasi itu berdasarkan perkiraan kebutuhan daya

hingga 2026 dari PLTN.

"Perkiraan saya, sampai dengan 2026 PLTN akan berkontribusi sekitar 2%, atau sekitar 10.000 MW. Mungkin dibutuhkan sekitar 10 reaktor dan kalau diasumsikan satu lokasi bisa hasilkan sekitar 3.000 MW sampai 4.000 MW, artinya hanya butuh tiga lokasi."

Evita menargetkan pembangunan PLTN pertama akan tuntas 2015 hingga 2019 dengan perkiraan kapasitas 1.000 MW.

Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengatakan pada 2001 sebenarnya sudah diputuskan bahwa PLTN perdana harus sudah masuk sistem pada 2017. Pada saat itu, PLTN sudah cukup ekonomis dikembangkan dengan kapasitas 300 MW.

"Memang ada perdebatan sejak 1980, mana yang lebih efisien antara PLTU batu bara dan PLTN. Kesimpulan waktu itu, PLTN diundur, tetapi ada saatnya nanti Indonesia akan membutuhkan nuklir," jelasnya.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DE
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN: 14

TAH

Krisis listrik di RI hanya sementara

TOKYO: Asosiasi Pebisnis Jepang - Indonesia di kawasan Jepang barat (Japan-Indonesia Business Association of Kansai - JIBAK) menilai krisis listrik yang terjadi di Indonesia hanya sementara dan bisa segera diatasi pemerintah Indonesia.

"Kami melihatnya sebagai persoalan saat ini, yang akan bisa cepat diatasi Pemerintah Indonesia. Apalagi kami juga melihat upaya nyata yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi krisis listriknya," kata Ketua JIBAK Hajime Kinoshita di Tokyo, kemarin.

Kinoshita mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap para pengusaha Jepang di Indonesia yang mengeluhkan krisis listrik di Indonesia. (ANTARA)

17

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : A.17

PLN dan Pengusaha Bahas Tarif

Tarif yang ditetapkan PLN melanggar undang-undang.

JAKARTA — PT PLN (Persero) mulai melakukan negosiasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengenai usulan tarif listrik industri. "Kami inginkan tarif pada Senin-Jumat mendekati tarif kenomian sebesar Rp 1.300 per kilowatt per jam," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mohtar kemarin.

Dia menjelaskan, nantinya tarif listrik pada Sabtu-Minggu lebih murah dibandingkan Senin-Jumat. Saat ini, kata Fahmi, PLN telah membagi pergeseran jam kerja menjadi 12 klaster industri berdasarkan area wilayah distribusi. Klaster industri tersebut nantinya secara bergiliran menggeser jam kerjanya setiap bulan.

Sebelumnya, kalangan pengusaha memilih kenaikan tarif dasar listrik dibanding melakukan pergeseran jam kerja ke Sabtu dan Minggu. Menurut Ketua Umum Kadin Mohamad S. Hidayat mengatakan sekitar 40 persen dari 120 anggotanya mendukung kenaikan tarif listrik. "Kami realistis, kekuatan pasokan listrik sampai kapan," ujarnya.

Saat ini, kata Hidayat, pihaknya sudah membicarakan tarif listrik untuk kalangan industri dengan manajemen PLN. "Kami meminta perhitungan detail biaya produksi listrik," katanya.

Anggota Komisi Energi dari Partai Demokrat, Sutan Batoeghna, menyatakan dukungannya terhadap pem-

etapan tarif industri tidak memerlukan persetujuan parlemen. "Itu bisnis ke bisnis. Kalau melibatkan rakyat banyak, baru sepersetujuan kami," ujarnya kemarin.

Sekretaris Advokasi Konsumen Listrik Indonesia Yunan Lubis menyatakan penetapan tarif listrik oleh selain pemerintah melanggar undang-undang. Dia mengutip Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 16 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan, tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah.

Menurut Yunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/2005, harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan ditetapkan presiden atas usul menteri. "Jika PLN menetapkan sendiri tarif industri, itu melanggar undang-undang dan bisa digugat," ujarnya kepada *Tempo*.

Terkait rencana pemutusan sementara sambungan listrik kepada industri, Yunan menjelaskan, PLN tak berhak melakukan pemutusan listrik selama pelanggan memenuhi isi kontrak. Dia mengatakan dalam kontrak disebutkan, PLN akan menyediakan sambungan listrik dan pelanggan berkewajiban membayar tagihan. "Selama kontrak dipenuhi, tidak ada alasan PLN memutus sambungan listrik," katanya.

Pemerintah pada awal pekan ini mengeluarkan peraturan bersama tentang pengalihan hari kerja industri dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu. Industri yang tidak menaati peraturan tersebut akan dikenai pemutusan

18

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 15

TAHUN

Mendadak, Penandatanganan SKB Lima Menteri

[JAKARTA] Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yang dilakukan Senin (14/7) dinilai mendadak. Solusi persoalan defisit pasokan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (persero) yang tertuang dalam SKB tentang pergeseran hari kerja industri merupakan fakta nyata bahwa keputusan tersebut diambil dengan tergesa-gesa.

Demikian disampaikan, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi kepada SP, Selasa (15/7) malam.

Menurut Bambang, Kadin seperti dipaksa mendukung keputusan yang belum mencapai ke-

sepakatan. Padahal, kata dia, rencananya Kadin masih akan mendiskusikan persoalan SKB di kantor Wakil Presiden, hari ini, Rabu (16/7).

"Ada beberapa hal yang masih dalam pembahasan, persoalan ketentuan lembur buruh, dan harus bukanya kantor pelayanan pemerintah, seperti kantor Bea dan Cukai, Pelabuhan, kantor Pajak dan Perbankan, pada hari libur Sabtu atau Minggu. Alasannya, karena proses industri, distribusi, dan transaksi tidak bisa ditunda," ujar Bambang.

Padahal, sebelum ditetapkan menjadi kebijakan yang definitif, rekomendasi kebijakan maupun keputusan di bidang ekonomi dari tim ekonomi di kabinet harus dipelajari dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para staf ahli

bidang ekonomi.

"Hal ini perlu ditegaskan lagi, karena Kadin melihat, pemerintah akhir-akhir ini telah bertindak dan bersikap kontraproduktif. Baru saja menerbitkan paket kebijakan ekonomi dalam Inpres No. 5/2008 untuk memperbaiki iklim investasi, kini dirusak dengan kebijakan instan di sektor kelistrikan," kata dia.

Bambang menilai, pemerintah telah bertindak terburu-buru tanpa mengkalkulasi risiko besar yang akan dihadapi negara di kemudian hari. Kadin, dia lanjutkan, khawatir, jika hal ini dibiarkan dapat mengganggu upaya *recovery* dan mengancam pertumbuhan ekonomi. Hal senada juga dikatakan Ernovian. Menurut dia, penandatanganan SKB tersebut memang terkesan mendadak. [CNV/M-6]

19

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 8.2

TAHUN 20

**Kepulauan Seribu
Kekurangan Listrik**

JAKARTA — Ribuan warga Kepulauan Seribu kesulitan pasokan listrik. Jaringan kabel bawah laut yang telah terpasang sejak Maret lalu hingga kini belum dinikmati sebagian besar warga.

“Instalasi baru terhubung untuk Pulau Untung Jawa saja,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Purwoto kemarin.

Kesulitan menghubungkan jaringan kabel laut ke rumah karena warga memakai instalasi listrik yang tak standar. ● RIKY FERDIANTO

20

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 15

TAHUN

Kelistrikan dalam Titik Nadir

[JAKARTA] Kondisi kelistrikan nasional saat ini berada dalam titik nadir. PLN memiliki masalah serius dilihat dari sisi kehandalan pembangkit, modal melainkan juga kredibilitas PLN di mata masyarakat.

"Pembangkit-pembangkit listrik nasional terancam tutup karena tidak adanya pasokan energi primer. Harga batu bara dan gas melambung tinggi, biaya produksi juga semakin tinggi. Namun, harga jual listrik PLN sangat rendah sehingga untuk membeli bahan bakar primer pun tidak ada," kata Pengamat Listrik Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (15/7).

Pemadaman terus terjadi sejak 2005 hingga sekarang. Reserve margin atau daya cadangan berkisar 25 persen bahkan lebih rendah.

"Keandalan sistem Jawa Bali berada pada kondisi rentan dan berisiko terjadi pemadaman karena kerusakan pembangkit dan tidak adanya pasokan energi primer. Pembangkit-pembangkit listrik terancam tutup karena tidak mampu membayar batu bara dan gas seperti PLTU Palu," katanya.

PLTU Cilacap tidak punya uang untuk membayar batu bara sehingga harus meminjam uang dari PLN.

Kredibilitas PLN dan para perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) di mata *banker* sangat rendah. Akibatnya

PLN tidak memiliki dana untuk membangun pembangkit baru.

Bahkan pemerintah berencana menjual aset PLN untuk mendapatkan modal proyek pembangkit tahap kedua. Ini dikarenakan PLN dianggap tidak *bankable* bagi para *bankir*.

"PLN dinilai tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tidak ada bankir yang mau memberikan pinjaman dana kepada PLN yang 60 persen pendapatannya diperoleh dari subsidi pemerintah," ujarnya.

Sementara perusahaan pembangkit swasta juga tidak memiliki modal.

Kualitas pembangkit yang dibangun pun buruk sehingga menimbulkan masalah baru dan menambah biaya produksi.

Tidak adanya pendanaan pembangunan pembangkit juga ditegaskan

oleh Dirjen Listrik dan Pemberdayaan Energi, J Purwono. Purwono menuturkan, PLN terpaksa menjual pembangkit listriknya karena ketidaktersedianya dana.

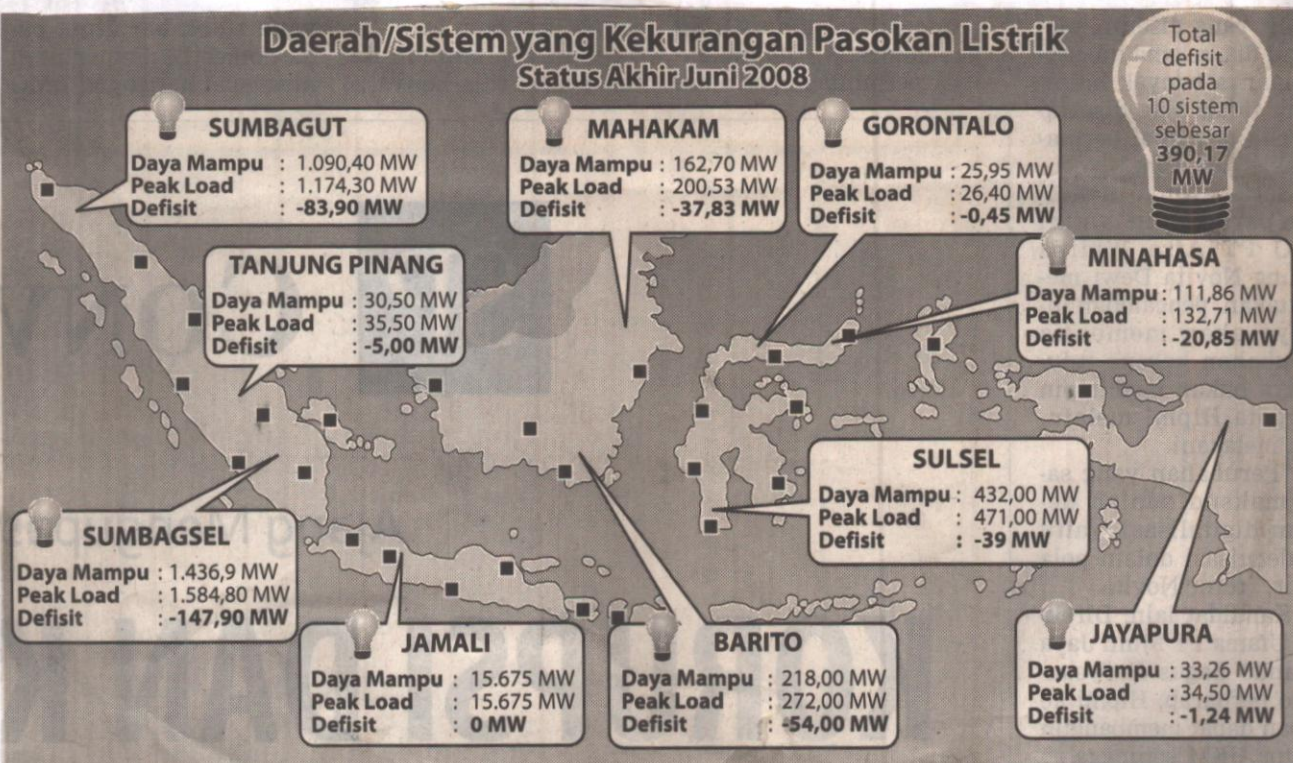
"IPP kesulitan dana untuk membangun, *bankir* meminta jaminan sementara PLN tidak bisa memberikan. Oleh karena itu PLN menawarkan IPP membeli aset PLN agar

IPP bisa menggunakan proyek pembangkit tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan modal," katanya.

Purwono menuturkan, rencana penjualan aset PLN untuk membangun proyek 12.000 MW akan dilakukan internal PLN atas persetujuan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Keuangan karena masih aset negara.

Fabby menambahkan,

Daerah/Sistem yang Kekurangan Pasokan Listrik Status Akhir Juni 2008



Sumber: PLN

sar 60 kWh, melebihi itu pelanggan harus membayar tarif non subsidi," katanya.

Saat ini biaya pokok rata-rata PLN Rp 1.900 per kWh, Tetapi PLN harus menjual kepada konsumen berkisar Rp 600 kWh. "Jelas PLN akan bangkrut. Ditambah PLN harus membeli bahan bakar dengan harga pasar," kata Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi

Tulus mengungkapkan, selama sepuluh tahun terakhir ini kredibilitas PLN di mata masyarakat terus merosot.

Pada 2004-005 YLKI kebanjiran pengaduan masyarakat terhadap PLN mencapai 5.893 pengaduan dari 10 area pelayanan PLN. Sebanyak 1.962 kasus (33,3 persen) pengaduan berkenaan dengan kualitas produk seperti gangguan pemadaman dan aliran listrik yang tidak stabil. Sebanyak 1.344 kasus berkaitan dengan pelayanan petugas PLN, prose bisnis sebanyak 893 kasus, lain-lainnya terkait dengan saran dan prasarana listrik PLN.

"Ini bentuk pelanggaran hak-hak publik yang tidak hanya oleh PLN sebagai operator, tapi juga pemerintah sebagai regulator," tegas Tulus. [DLS/M-6]

dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan kelistrikan nasional tidak akan pernah membaik. Kecuali jika pemerintah turun tangan untuk membantu menjamin pasokan energi primer dan modal PLN.

"Pemerintah perlu melakukan rasionalisasi tarif listrik yang mencerminkan *cost recovery* untuk menambah pendapatan PLN. Misalnya, pelanggan hanya diberikan batasan subsidi listrik sebe-

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 6

TAHUN

Mengurai Lingkaran Setan Masalah Listrik

Dr Sri Adiningsih
Ekonom UGM



Lepas dari krisis ekonomi tampaknya belum dapat membawa bangsa Indonesia bernapas lega, menikmati hidup yang sejahtera, bebas dari berbagai masalah dan tekanan hidup yang berat. Krisis dalam berbagai dimensi masih saja harus kita hadapi. Dari krisis bahan bakar minyak (BBM) yang membuat kita harus antre atau tidak bisa mendapatkannya untuk sehari-hari, krisis minyak goreng—sempat ada antrean untuk mendapatkan minyak goreng dari pemerintah—, krisis mini valuta asing—rupiah sempat tembus Rp12.000 untuk tiap dolar AS pada Agustus 2005—hingga krisis listrik yang mencapai puncaknya sekarang ini.

Berbagai krisis atau situasi yang dianggap kritis tadi semuanya membuat kita paling tidak merasa tidak nyaman, bahkan untuk sebagian besar masyarakat lain jelas membuat kehidupan semakin berat, aktivitas ekonominya terganggu atau tidak dapat dijalankan sehingga akhirnya masyarakat harus menderita.

Krisis listrik sebenarnya tidak perlu terjadi jika berbagai paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah diimplementasi dengan baik. Namun sayangnya pemerintah meskipun sudah meluncurkan paket kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, bahkan menyelenggarakan *Infrastructure Summit* secara internasional sampai dua kali di Jakarta, tetap saja tidak dapat menghindari krisis listrik. Bahkan

masalah listrik yang semakin berat harus kita hadapi dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya sekarang ini, atau bisa lebih buruk?

Oleh karena itulah pemerintah tampaknya pada akhirnya mengambil kebijakan yang keras dengan pengalihan hari kerja industri melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri yang diluncurkan pada 14 Juli 2008 lalu. Padahal kebijakan ini meskipun mungkin dapat mengurangi beban listrik terpakai pada saat-saat tertentu, tetapi berpotensi menimbulkan dampak sampingan yang banyak sehingga jika tidak hati-hati justru akan kontraproduktif.

Masalah Lama

Masalah kekurangan listrik sebenarnya lagu lama Indonesia, yang pada waktu krisis ekonomi—karena keterbatasan anggaran—tidak mendapatkan prioritas dalam APBN sehingga konsumsi listrik per kapita kita pada tahun 2004 masih sangat rendah, yaitu 478 kwh. Jika dibandingkan dengan negara lain, kita sangat ketinggalan. Malaysia saja sudah mencapai hampir 6 kali kita atau sebesar 3.166 kwh, Filipina mencapai 597 kwh, Singapura 8.170 kwh, Thailand 1.865 kwh, bahkan Vietnam saja 501 kwh pada tahun yang sama. Ini berarti kondisi kelistrikan Indonesia terburuk dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Tingkat konsumsi kita hanya sedikit di atas rata-rata *low income countries* yang sebesar 375 kwh, namun jauh dibawah rata-rata *low middle income countries* yang sebesar 1.243 kwh per kapita pada periode yang sama (Bank Dunia, 2007).

Dengan potret seperti itu, sebenarnya yang dilakukan pemerintah de-

ngan membuat paket kebijakan infrastruktur dan *Infrastructure Summit* adalah sudah benar. Namun sayangnya pemerintah tidak mampu mengimplementasikan dengan baik berbagai kebijakan tersebut sehingga dapat kita lihat hasilnya, masalah kelistrikan bukannya semakin terurai, tetapi justru semakin kusut. Pada akhirnya kita harus membayar mahal krisis listrik yang parah pada saat ini.

Jelas menarik bagi kita untuk menganalisis pihak yang mestinya bertanggung jawab. Lebih penting lagi adalah mengurai cara mengatasi masalah ini agar dampaknya pada kehidupan masyarakat dan dunia usaha minimal serta menghindari masalah yang tidak terjadi lagi.

Tentu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki monopoli dalam mendistribusikan listrik pada masyarakat akan lebih banyak menerima kemarahan publik. Semuanya berhulu pada ketidakmampuan PLN dalam melayani pasokan listrik dengan baik dan mengantisipasi peningkatan permintaan listrik yang semakin tinggi.

Namun, kita harus ingat, kemampuan PLN juga terbatas karena terbatasnya anggaran PLN dan kewenangannya. Untuk dapat mengatasi krisis listrik ini jelas perlu anggaran yang besar. Itu di luar kemampuan PLN. Tentu saja pihak swasta bisa juga membantu pendanaan pembangkit listrik kita dengan berbagai skema yang memungkinkan. Demikian pula jelas bahwa pada akhirnya masalah kurangnya pasokan listrik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sayangnya, meskipun pemerintah sudah memiliki paket kebijakan yang

bagus, hal itu tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Tentu saja kenaikan harga BBM bisa dijadikan kambing hitam, tetapi tetap saja adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan infrastruktur seperti listrik yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa pada saat ini (apalagi negara lain tidak menghadapi krisis listrik seperti kita). Masalah infrastruktur selam ini tidak menjadi prioritas dalam APBN kita. Padahal setelah ekonomi pulih sejak 2004, keuangan negara sudah semakin ringan bebannya—meskipun masih berat—sehingga mestinya pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk membangun infrastruktur seperti listrik. Krisis pasokan listrik ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan prioritas dalam membenahi masalah kelistrikan.

Masalah *fiscal trap* yang dikhawatirkan dalam beberapa tahun ini tampaknya sudah menjadi kenyataan. Anggaran pemerintah dari pusat sampai daerah cenderung banyak dialokasikan untuk program yang populis, khususnya mendekati tahun pemilu. Akhirnya anggaran untuk pembangunan seperti infrastruktur (termasuk listrik) ataupun pembangunan sumber daya manusia yang perlu anggaran besar—tetapi hasilnya tidak langsung kelihatan—kurang mendapatkan prioritas.

Pola itu membuat kita terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan karena praktik itu terus kita lakukan. Kita harus memutuskan rantai tersebut. Mudah-mudahan pihak-pihak yang memiliki otoritas memiliki cukup *wisdom* untuk memilih yang terbaik bagi bangsa dan negara ini dalam politik anggaran kita sehingga dapat memutus lingkaran setan tersebut. (*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 12

TAHUN

PLN Bentuk 12 Kluster Industri

JAKARTA (SINDO) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengelompokkan pelanggan industri yang tersebar di Pulau Jawa dalam 12 kluster.

Langkah ini sebagai implementasi diberlakukannya peraturan bersama lima menteri tentang pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa-Bali.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan, dengan adanya pengelompokan ini industri terkena pengalihan kerja dua kali dalam satu bulan. "Pengelompokan pelanggan industri menjadi 12 kluster ini dilakukan berdasarkan wilayah distribusi PLN, yaitu Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Dengan mekanisme kluster ini diharapkan PLN dapat mengurangi beban sekitar 50 megawatt (MW). Pemasnya saat ini pengurangan beban yang ingin dilakukan PLN hingga 600 MW. Fahmi menjelaskan, pola pengaturan jam kerja ini masih akan dibicarakan dengan industri karena pengalihan jam kerja bersifat tidak tetap. Dia mencontohkan jam kerja pada Senin bisa dipindah ke Sabtu, atau Selasa dipindahkan ke Minggu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jawa, Madura, dan Bali PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan surat peraturan bersama itu mulai disosialisasikan pada 21 Juli nanti. Jika sosialisasi tidak dilakukan, dikhawatirkan

akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah tahap sosialisasi ini, masa efektif peraturan bisa direalisasikan 31 Juli. Departemen Perindustrian (Depperin) menyebutkan sedikitnya delapan sektor industri manufaktur tidak ber-

kewajiban memenuhi kewajiban menggeser jam kerja sesuai peraturan bersama lima menteri. Masing-masing industri tersebut beroperasi penuh selama 24 jam dalam 7 hari sehingga berada di luar ketentuan peraturan bersama.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari menjelaskan, delapan sektor manufaktur itu adalah industri kimia dasar, polietilena dan propilena (bijih plastik), pengolahan baja canai dan lembaran panas (*hot rolled steel flat carbon/HRSFC*) berbasis dapur *blast furnace* (pembakaran), serat sintetis, semen, pupuk, aluminium batangan, dan keramik.

"Kelompok industri tersebut tidak dikenai (pengurangan listrik dan aturan jam kerja). Karena itu, pemerintah berusaha agar seluruh sektor yang beroperasi selama 24 jam dapat tetap beroperasi," kata Ansari kemarin.

Seperti diketahui, peraturan bersama tentang pengalihan jam kerja telah ditandatangani lima menteri pada 14 Juli lalu. Penanda tangan peraturan tersebut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno.

Kritikan Megawati

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengecam pemberlakuan peraturan bersama lima menteri tentang pengalihan jam kerja. Dia menilai kebijakan tersebut tidak hanya menyulitkan dunia usa-

ha, tapi juga menyengsarakan masyarakat kecil.

Bagi Megawati, pemberlakuannya justru akan memperpuruk dunia usaha yang bergantung pada ketersediaan energi listrik. "Kalau diibaratkan, kemunculan peraturan bersama lima menteri itu sama saja membebani rakyat dua kali. Rakyat belum keluar dari kesulitan kenaikan harga BBM, sekarang ditambah lagi ada kebijakan soal listrik itu," katanya saat menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim, Sutjipto-Ridwan Hisyam (SR) di Madiun kemarin.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa para pengusaha nasional sudah bisa menerima keputusan pengalihan jam kerja. Diinginkan para buruh juga berkorban agar bisa membantu pemerintah menyelesaikan defisit pasokan listrik nasional.

(ferial thalib/agung kurniawan/muhammad roqib)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 12

TAHUN

PENGHEMATAN SUDAH SIGNIFIKAN Fauzi: Tak Perlu Ada Pemadaman Lagi

JAKARTA (Suara Karya): Pemprov DKI Jakarta belum diajak bicara oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja industri di Jawa-Bali yang berlaku mulai 21 Juli 2008.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Rabu (16/7). Pengalihan waktu kerja dua hari pada Senin hingga Jumat ke Sabtu dan Minggu (pasal 2 ayat 1 SKB--Red) sempat menjadi pro dan kontrak di kalangan masyarakat pengusaha di berbagai daerah.

"Dinas tenaga kerja belum bisa melaksanakan SKB itu karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah. Kita belum diajak bicara terkait dengan penghematan energi," ujar Fauzi Bowo. Menanggapi imbauan hemat energi yang dilakukan oleh PLN, dan sudah dilakukan oleh masyarakat, seharusnya PLN tidak perlu melakukan pemadaman.

"Saya kira dengan penghematan yang dilakukan atas kesadaran masyarakat sudah cukup signifikan, dan tak perlu ada pemadaman lagi. Sebab, pemadaman itu akan merugikan ekonomi re-

menambahkan.

Seperti diketahui, lima menteri telah menandatangani SKB di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (14/7) lalu, yakni Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Sementara itu, terkait dengan penghematan energi, dalam waktu dekat, pemberian subsidi bagi nelayan di Kepulauan Seribu bakal direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat, dari 1.072 kapal nelayan, sudah 90 persen siap disalurkan BBM bersubsidi. Diharapkan, pelayanan dokumen bisa dilakukan di Kepulauan Seribu untuk meringankan beban nelayan.

Untuk pengurusan dokumen, Pemkab Kep Seribu menekankan pada UPT Penyeberangan agar dilakukan di pulau permukiman. Karena, jika pengurusan dokumen dilakukan di daratan Jakarta, dapat membebani nelayan itu sendiri. "Pelayanan dokumen harus di pulau agar nelayan dapat mudah mengurus," kata Bupati Kepulauan Seribu Abdul Rachman Andit.

24

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 2

TAHUN

JIBAK Nilai Krisis Listrik Sementara

TOKYO (Suara Karya): Asosiasi Pebisnis Jepang-Indonesia di kawasan Jepang barat (Japan-Indonesia Business Association of Kansai - JIBAK) menilai krisis listrik yang terjadi di Indonesia hanya sementara dan bisa segera diatasi pemerintah Indonesia.

"Kami melihatnya sebagai persoalan saat ini yang akan bisa cepat diatasi pemerintah Indonesia. Apalagi, kami juga melihat upaya-upaya yang nyata yang telah di-

lakukan Indonesia untuk mengatasi krisis listriknya," kata Ketua JIBAK, Hajime Kinoshita, di Tokyo, Rabu.

Kinoshita mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap para pengusaha Jepang di Indonesia yang mengeluhkan krisis listrik di Indonesia. Mereka juga menyampaikan jumlah kerugian yang mencapai miliaran rupiah serta kerusakan mesin-mesin industrinya.

"Dalam perspektif bisnis, krisis listrik memang

harus bisa diselesaikan dengan cepat dan kami optimistis bahwa Indonesia bisa mengatasinya," ujar Kinoshita.

Ketika menyinggung soal berbagai kegiatan promosi perdagangan dan investasi yang kini digalakkan KBRI Tokyo di Jepang bakal tidak efektif terkait krisis listrik, Kinoshita membantah hal tersebut.

Menurutnya, krisis listrik di Indonesia memang membayangi promosi kegiatan perdagangan dan investasi Indonesia di

Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Tokyo Tulus Budhianto mengatakan, kerja sama ini hendaknya juga dilihat dalam perspektif jangka panjang dan tidak saat ini saja. Apalagi dengan berlakunya secara efektif kerja sama ekonomi EPA per 1 Juli lalu.

KBRI Tokyo sendiri akan menggelar seminar dan eksibisi di Tokyo pada 17-19 Juli 2008 di kawasan Shinjuku. Seminar itu bertujuan menjelaskan kebijakan reformasi ekonomi

Jepang. Namun, karena kedua negara sudah sepakat untuk tetap melanjutkannya, maka sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi, ada payung kerja sama berupa Economic Partnership Agreement (EPA) yang diakui kedua negara.

"Promosi perdagangan yang dilakukan hendaknya tetap terus dijalankan, mengingat pebisnis Jepang juga ingin mengetahui perkembangan terbaru dari kebijakan reformasi ekonomi Indonesia," katanya.

terbaru yang sedang dilakukan Indonesia. Sedangkan eksibisi bertajuk "Little Indonesia in Japan" menjadi semacam bukti bagi prospek perdagangan dan investasi kedua negara.

Total perdagangan Jepang - Indonesia 2007 mencapai 35,5 miliar dolar AS, baik dari sektor migas maupun non migas. Dari sektor migas tercatat perdagangan 10,6 miliar dolar dan nonmigas 24,9 miliar dolar.

Sementara hingga April 2008, total perdagangan kedua negara bernilai 14,5 miliar dolar. Sektor migas mencapai 5,3 miliar dolar, sedangkan nonmigas tercatat 9,2 miliar dolar.

(Ant/Kentos)

25

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 13

TAHUN

■ **TARIF LISTRIK INDUSTRI**

Tarif Listrik Industri Minimal Rp 1.000/

JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapat angin segar. Rencana menaikkan tarif listrik industri bakal berjalan mulus.

Saat ini, pengusaha mendukung penuh rencana tersebut. "Industri mengerti kesulitan yang kami hadapi. Dalam beberapa kali negosiasi mereka setuju tarif naik agar pasokan listrik PLN terjamin," kata Murtaqi Syamsuddin, Direktur PT PLN wilayah Jawa Bali, Rabu (16/7).

Cuma saat ini PLN dan industri masih membahas besaran kenaikan tarif. PLN berharap, sebisa mungkin besaran kenaikannya mendekati nilai keekonomian alias harga pasar. "Nilai keekonomian tarif untuk industri itu berbeda-beda, tergantung tegangan listrik yang dipakai," ujar Muratqi.

Nah, berdasarkan tegangan listrik itu, ada tiga kelompok industri. Pelanggan tegangan tinggi, menengah, dan rendah. Dengan tiga kategori itu, tarif listrik industri minimal Rp 1.054 per kilowatt hour (kwh).

Tarif pasar untuk pelanggan tegangan tinggi sebesar Rp 1.125 per kwh. Untuk tegangan menengah sebesar Rp 1.120 per kwh,

sedang tegangan rendah Rp 1.054 per kwh.

Saat ini, tarif jual PLN hanya Rp 600 per kwh, sedang rata-rata biaya pokok penyediaan listrik jauh di atas itu, yakni Rp 1.334 per kwh. "Karena itu, nanti penetapan kebijakan tarif akan dilakukan sesuai nilai keekonomian tersebut," ujar Murtaqi.

Menurut Murtaqi, industri tak keberatan dengan evaluasi tarif tersebut. Dari situlah negosiasi *business to business* (B to B) antara PLN dan pengusaha membahas tarif mulai dilakukan, dan masih berlangsung hingga sekarang. "Prinsipnya, pengusaha ingin membantu PLN mengatasi defisit, baik dari sisi pasokan maupun keuangan perusahaan," imbuh Murtaqi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengaku, pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) tak keberatan bila PLN menaikkan tarif. Namun syaratnya, listrik tak boleh padam lagi. Bila masih padam, kata dia, PLN harus memberi ganti rugi. "Itulah aspirasi dari kami," cetus Ernovian.

Haivid Vebri

26

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 6

TAHUN

September, PLN Jual Dua Jenis Obligasi Rp 3 T

PLN menunggu laporan keuangan semester pertama selesai

Diade Riva Nugrahani

JAKARTA. Keinginan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan obligasi sekitar Rp 3 triliun hingga kini belum terealisasi. Perusahaan pelat merah itu harus bersabar menanti selesainya proses audit laporan keuangan semester pertama 2008, yang menjadi basis penerbitan surat utang tersebut. Selain itu, PLN masih mempertimbangkan kondisi pasar obligasi yang belum stabil saat ini.

Menurut Rudiantara, Wakil Direktur Utama PLN, anjloknya pasar modal dunia dalam dua hari terakhir akan berimbas ke bursa regional dan dalam negeri. Alhasil, PLN perlu hati-hati menentukan waktu yang tepat untuk menerbitkan obligasi. "Kami akan menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan keadaan pasar lokal seperti apa nanti," katanya kepada KONTAN, Rabu kemarin (16/7).

Dia enggan memperkirakan waktu penerbitan obligasi PLN. Yang jelas, jika kondisi pasar sudah membaik, PLN siap meluncurkan surat utang yang kemungkinan akan memiliki jangka panjang tersebut. "Kami masih harus melihat kondisi pasar dulu," imbuh Rudiantara.

Marciano Herman, *Vice President Investment Banking* Danareksa Sekuritas, selaku salah satu penjamin pelaksana emisi

29

(*underwriter*) obligasi PLN, memberikan penjelasan lebih terbuka. Sebagai catatan, beberapa waktu lalu, PLN telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi, yaitu Danareksa, Trimegah Securities, dan Indopremier Securities. Nah, menurut Marciano, penerbitan obligasi PLN masih harus menunggu penyelesaian audit laporan keuangan semester pertama 2008 PLN.

PLN akan menerbitkan dua jenis obligasi, yaitu konvensional dan sukuk.

Ia memperkirakan, proses audit itu baru rampung dua bulan lagi. Setelah itu, PLN akan menyerahkan proposal ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Jika semuanya lancar, mungkin, obligasi PLN baru bisa terbit pada September atau Oktober mendatang.

Marciano mengakui, penerbitan obligasi itu sedikit mundur dari rencana semula. Sebab, tadinya, PLN ingin memakai laporan keuangan kuartal pertama 2008. "Tapi, situasi pasar sedang kurang baik," ujarnya. Cuma, itu tidak menyurutkan

keinginan PLN menjual obligasi senilai Rp 3 triliun tahun ini.

Buat membiayai proyek

Marciano menambahkan, surat utang PLN itu akan terdiri atas dua jenis, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah alias *sukuk*. Namun, komposisi nilai dan struktur surat utang itu masih belum ditentukan. "Keadaan *market* sudah membaik, jadi bisa obligasi jangka panjang atau menengah," imbuhnya.

Nantinya, PLN akan memakai dana obligasi itu untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 7.000 Mega Watt (MW), yang merupakan bagian dari megaprojek pembangkit listrik 10.000 MW. Sebelumnya, manajemen PLN pernah bilang, mereka butuh dana sekitar Rp 13 triliun untuk membiayai proyek PLTU 7.000 MW tersebut. PLN telah memperoleh pinjaman bank berjangka waktu 10 tahun senilai Rp 5,7 triliun.

Analisis obligasi Mandiri Sekuritas Handi Yunianto berpendapat, penerbitan obligasi merupakan langkah paling tepat bagi PLN jika mereka membutuhkan dana besar dalam waktu yang cepat. "Lagipula, kondisi pasar obligasi sudah membaik sekarang," imbuhnya. Selain itu, rekam jejak obligasi PLN selama ini juga cukup bagus.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 22

TAHUN

SKB PENGALIHAN JAM KERJA

7 Sektor Industri Dikecualikan dari Ketentuan

JAKARTA – Tujuh sektor industri manufaktur akan dikecualikan dari pengaturan jam kerja industri yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) lima menteri. Ketujuh sektor itu beroperasi penuh selama 24 jam per hari, sehingga tidak perlu menggeser jam kerja.

Ketujuh sektor manufaktur itu antara lain industri petrokimia, baja (*hot rolled coils*/

HRC), tekstil hulu (serat sintetis), semen, pupuk, pengolahan aluminium, dan keramik. Selain itu, pemadaman listrik akan mudah mengakibatkan rusaknya mesin produksi di ketujuh sektor industri tersebut.

“Kelompok industri tersebut tidak dikenakan (pergeseran jam kerja). Karena itu, pemerintah berusaha agar seluruh sektor yang beroperasi selama

24 jam dapat tetap beroperasi,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari di Jakarta, Rabu (16/7).

Pengecualian untuk industri yang beroperasi penuh selama 24 jam sehari dalam satu minggu merupakan salah satu butir yang disepakati SKB pengaturan jam kerja tentang

Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa – Bali pada Pasal 4.

Peraturan bersama itu telah ditandatangani Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yudiantoro, Menteri BUMN Sofyan Djailil, dan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno pada 14 Juli lalu.

Secara terpisah, Dirut PT Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang menjelaskan, industri baja khususnya di sektor hulu harus beroperasi selama 24 jam penuh dan hanya berhenti satu tahun sekali saat perbaikan (*overhaul*). Kendati demikian, kondisi *overhaul* tidak memengaruhi pasokan listrik,

karena telah diatur sesuai prosedur standar operasi. “Di industri baja, tidak ada yang harus disesuaikan. Industri baja ini adalah sektor usaha yang pasokan listriknya tidak boleh sedetik pun mati. Justru apabila pasokan listrik PLN dihentikan, pengoperasian pada saat beban puncak akan mengganggu operasional pabrik,” katanya. (dry)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 1

TAHUN

SKB Berlaku Mulai 31 Juli



FAHMI Mochtar.*

JAKARTA, (PR).-

Pengalihan jam kerja seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, akan efektif berlaku mulai 31 Juli 2008. Sementara, pada 21 Juli pemerintah baru akan memulai sosialisasi ke industri-industri. Pelaksanaan seperti itu tidak menyalahi aturan SKB.

"Kalau terburu-buru nanti malah ramai. Realistis saja kapan itu sebenarnya bisa dilakukan. Tanggal 21 itu kita baru sosialisasi," ujar Direktur Jawa Madura Bali PT PLN (persero) Murtaqi Syamsudin, se usai rapat dengar pendapat di Komisi

VII di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut dia, pengalihan jam kerja industri ini dilakukan untuk mengurangi beban listrik pada Senin sampai Jumat. Untuk pengalihan ini, industri di Jawa-Bali dibagi menjadi 12 kluster yang dikelompokkan berdasarkan dayanya, bukan jenis industrinya. Setiap kluster harus memiliki daya sekitar 600 mw.

Direktur PT PLN Fahmi Mochtar mengemukakan, kluster ini akan digilir untuk mengalihkan jam operasi mere-

29

ka dalam satu kali putaran 12 kluster. Sehingga, dalam satu bulan kira-kira tiap kluster akan mendapat jatah pengalihan dua kali pengalihan.

Total industri di Jawa mencapai 6.800 industri dengan total daya sekitar 8.500 mw. Industri yang mendapat pengecualian adalah industri yang bekerja 24 jam sehari selama seminggu penuh

"Industri yang akan dialihkan bebannya, untuk Jawa-Bali akan diatur dalam 12 kluster. Jadi, beban sebanyak 600 mva, Senin sampai Jumat akan dialihkan. Sehingga Sabtu dan Minggu akan bertambah 600 mva. Jadi ada pemerataan," katanya.

Ditambahkan, ke-12 kluster ini akan didistribusikan ke dalam 4 wilayah Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Fahmi mencontohkan, kluster I jam kerjanya pada hari Senin akan dialihkan ke Sabtu. Besoknya, pada Selasa giliran kluster dua yang dialihkan ke hari Minggu, dan seterusnya.

Fahmi menjelaskan, cadangan daya listrik PLN saat ini memang menurun menjadi tinggal 21%. Kondisi krisis listrik ini dipicu naiknya harga BBM sehingga membuat industri beralih dari pembangkit *genset* ke pasokan listrik dari PLN.

"Judicial review"

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dalam jangka waktu 10 hari, akan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pelaksanaan SKB lima menteri.

"Dalam jangka waktu 10 hari, *judicial review* akan diajukan karena SKB bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tutur Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu F.X. Arief Poyuono, dalam seminar nasional di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (16/7).

Ia mengatakan, salah satu poin yang menjadi keberatan dari serikat pekerja adalah masalah kebebasan beribadah dan pengaturan upah lembur di hari libur resmi, yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003, yang tercermin pada pasal 80 dan 85.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengaku pasrah terhadap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurut dia, yang penting kalangan pengusaha mendapatkan kepastian terhadap pasokan listrik.

"Mereka (pengusaha Jepang) setuju, tetapi yang penting ada kepastian. Mereka mengeluh ada 115 kali pemadaman, 70 persennya tidak dikasih tahu," katanya. (A-75/A-109/Dtc)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 6

TAHUN

PENGALIHAN OPERASIONAL INDUSTRI

Depkeu Selaraskan Waktu Pelayanan Publik

JAKARTA (Suara Karya): Departemen Keuangan (Depkeu) akan meminta masukan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait pengalihan jam kerja operasional industri dan sektor usaha lainnya. Ini mengingat penyesuaian yang harus dilakukan terkait pelayanan publik yang harus disiapkan.

"Kadin juga kami minta menyampaikan bagaimana operasional SKB ini dan kemudian pengaturan detail. Ini termasuk bagaimana dukungan dari pelayanan-pelayanan yang harus menyertainya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (16/7).

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai (BC) Depkeu Anwar Suprijadi mengatakan, pihaknya mengirimkan surat perintah ke kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai di daerah-daerah agar siap menindaklanjuti SKB tersebut. "Kita kan pengalaman, hari libur ke-jepit kan kita buka juga. Kita punya pengalaman," kata Anwar menjelaskan ke-siapan BC jika harus mem-buka kantor pelayanan pada akhir pekan.

Menurut Anwar, BC juga akan bertemu dengan pengusaha atau industri skala besar di jalur prioritas di beberapa kawasan dalam beberapa hari ke depan. "Kita tanya kebutuhan mereka, jam berapa, hari apa. Terus bagaimana mekanisme yang harus kita siapkan," ucapnya seraya

menambahkan bahwa pihaknya akan mengundang para kepala kantor BC yang dinilai strategis, seperti Tanjung Priok, Semarang, Tanjung Perak, Bekasi, Bogor, dan Purwakarta.

Selain itu, pihaknya juga bergantung pada perbankan dan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan juga akan memberikan pelayanan pada akhir pekan. "Tapi pengalaman kita pada waktu hari libur itu, perbankan juga mau buka. Kita sudah koordinasikan,"

ucapnya.

Secara umum, lanjut Anwar Suprijadi, BC siap menyesuaikan diri dengan pengalihan jam kerja industri pada Sabtu dan Minggu. "Kita juga akan tanya ke industri, apakah mereka butuh kita untuk buka atau tidak? Kalau kami buka, tapi pengusaha tidak butuh, nanti percuma juga," katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan, implementasi *national single window* (NSW) sangat membantu operasionalisasi BC sehingga tidak ada masalah yang berat. "Cuma kita minta BI dan Ditjen Perbendaharaan



DEMO KARYAWAN - Puluhan karyawan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja di depan kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta, Rabu (16/7). Dalam aksinya mereka menuntut perbaikan sistem manajemen dan struktur penggajian disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan. (Ant/Hasan Sakri Ghozali)

supaya bank persepsinya juga bisa buka," katanya.

Dibagi

Sementara itu, PLN akan mengelompokkan industri di Jawa dalam 12 klaster, di mana setiap klaster akan mendapatkan dua kali pengalihan jam operasional di setiap bulannya. Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, in-

dustri yang akan dialihkan bebannya untuk Jawa-Bali, akan diatur secara detail. "Kita bagi dalam 12 klaster. Jadi beban sebanyak 600 MVA pada Senin sampai Jumat akan dialihkan. Sehingga Sabtu dan Minggu akan bertambah 600 MVA. Jadi ada pemerataan," ujarnya.

Ke-12 klaster ini akan didistribusikan ke dalam 4

wilayah Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fahmi lantas mencontohkan, misalkan klaster I, jam kerjanya pada hari Senin akan dialihkan ke Sabtu. Besoknya pada Selasa giliran klaster dua yang dialihkan ke hari Minggu, dan seterusnya. Dengan pengalihan jam kerja ini, maka diharapkan beban

listrik pada Senin sampai Jumat bisa dikurangi.

Menurut Fahmi, cadangan daya listrik PLN saat ini memang menurun menjadi tinggal 21 persen. Kondisi krisis listrik ini dipicu naiknya harga BBM sehingga membuat industri beralih dari pembangkit gensetnya ke pasokan listrik PLN.

(A Choir/Antara/Indra)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 15

TAHUN

Cemas Menanti Terang

Oleh
NOVAN DWI PUTRANTO

JAKARTA-Meski jadwal pemadaman bergilir sudah dibagikan sejak pekan lalu, Pudjiwinanto (29), masih harus memastikan apakah wilayahnya akan terkena pemadaman bergilir pada hari itu. Pegawai swasta yang tinggal di kawasan Cibubur dan bekerja di sebuah mal terkemuka di bilangan Depok tersebut mengaku, masih cemas dengan adanya rencana pemadaman bergilir. "Saya harus memastikan semuanya dulu, air dan sebagainya," keluhnya.

Kondisi kelistrikan beberapa tahun terakhir terlihat memasuki masa krisis. Pada masa-masa sebelumnya, pemadaman listrik khususnya di Ibu Kota Jakarta jarang terjadi. Namun sekarang, pemadaman listrik bergilir mengancam setiap saat.

Terakhir, akibat terganggunya pasokan gas ke PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok, wilayah Jakarta dan sekitarnya mesti mengalami pemadaman listrik bergilir tidak

kurang selama dua minggu, yakni 11-25 Juli 2008. Proyek pemeliharaan pipa gas tersebut mengakibatkan pasokan listrik DKI Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mengalami defisit 150 megawatt.

Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya skema pemenuhan kelistrikan di Ibu Kota dan sekitarnya yang merupakan pusat pemerintahan. Selain itu, hal ini juga merupakan potongan gambaran besar dari kondisi kelistrikan sesungguhnya.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik tidak mampu tumbuh secepat pertumbuhan kebutuhan listrik di dalam negeri. Total daya pembangkit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 29.705 megawatt, yang terdiri dari Jawa-Bali 22.302 megawatt dan luar Jawa-Bali 7.403 megawatt. Sebanyak 24.856 megawatt di antaranya berasal dari pembangkit milik PLN, dengan komposisi Jawa-Bali 19.283 megawatt dan luar Jawa-Bali 5.573 megawatt, serta sisanya milik swasta.

Saat ini, beban puncak di Jawa-Bali sudah mencapai 17.000 megawatt. Artinya, dengan daya terpasang 22.000 megawatt, cadangan daya pembangkit hanya tersisa 5.000 megawatt atau hanya sekitar 20 persen. Suatu negara idealnya padahal memiliki cadangan minimal 30 persen. Tak mengherankan, dengan keterbatasan daya, PLN terpaksa melakukan pengendalian beban yang di antaranya bisa berupa pemadaman listrik bergilir. Keterbatasan daya pembangkit yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu.

Keterbatasan daya tersebut diperparah dengan beralihnya industri ke PLN untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Hal tersebut disebabkan meroketnya harga bahan bakar minyak industri yang biasa digunakan untuk pembangkit. Hal ini berdampak pada peningkatan beban yang harus ditanggung PLN.

Skema cepat untuk mengatasi krisis listrik diambil dengan rencana mengalihkan jam operasi kerja bagi industri.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Lima Menteri tersebut mendapat berbagai tanggapan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, langkah itu ditempuh untuk meratakan beban yang selama ini terfokus di hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat.

Menanti Obat

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengakui segala upaya dilakukan untuk mengupayakan terjaminnya ketersediaan listrik sambil menunggu "obat" dari proyek pembangkit 10.000 megawatt. "Proyek ini akan menjadi obat dari krisis listrik sekarang ini," katanya.

Proyek 10.000 megawatt akan menutupi kekurangan tambahan daya pembangkit yang terhambat pembangunannya akibat krisis ekonomi lalu. Fahmi mengatakan krisis ekonomi tahun 1998 telah membuat PLN kehilangan momentum membangun pembangkit baru.

Fahmi juga mengatakan, proyek 10.000 megawatt akan mengatasi ketimpangan antara

harga penjualan listrik yang hanya Rp 626,86 per kwh dengan biaya produksi Rp1.304 per kwh. Tingginya biaya produksi tersebut karena ketergantungan porsi BBM dalam bauran energi primer pembangkit masih tinggi, yakni mencapai 34 persen, namun menghabiskan biaya hingga 78 persen.

Dengan dibangunnya proyek 10.000 megawatt, porsi BBM dalam bauran energi tinggal tiga persen yang juga menurunkan konsumsi biaya menjadi hanya 13 persen. Sebaliknya, porsi batu bara pada tahun 2010 akan mendominasi bauran energi primer pembangkit, yakni mencapai 67 persen dengan biaya 51 persen.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Yogo Pratomo meyakini, meski di awal banyak menghadapi berbagai kendala, proyek 10.000 mw akan beroperasi sesuai target. "Kami optimistis proyek ini berjalan sesuai rencana, yakni 10 persen penyelesaian tahun 2009, 80 persen tahun 2010, dan 100 persen tahun 2011," katanya.

Saat ini, status 10 proyek yang berada di Jawa, adalah

sembilan proyek berdaya 6.672 megawatt sudah menjalani tahap konstruksi dan satu proyek berdaya 600 megawatt berupa persiapan tender ulang. Dari 30 lokasi di luar Jawa, sebanyak 18 proyek berdaya 1.506 megawatt telah menandatangani kontrak pembangunan, tujuh proyek 449 megawatt telah menandatangani *letter of intent* (LoI), dan lima proyek lainnya 304 megawatt masih persiapan tender.

Meski demikian, masih banyak pihak yang meragukan keandalan proyek 10.000 megawatt yang didominasi produk dan investor asal China. Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakah, seharusnya megaprojek tersebut mendapat pengawasan agar keandalannya bisa teruji. "Jangan asal murah, tapi juga harus tahan lama dan teruji," tegasnya.

Ia meminta proyek 10.000 megawatt mendatang bisa lebih baik dari yang pertama dan lebih memperhatikan kualitas pembangkit. "Program yang sedang berjalan kita dukung dan kawal, yang penting masyarakat bisa menikmati terang," katanya. ■

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 1

Oleh Esther Nuki dan Andryanto Suwismo

PENGUSAHA MINTA DITUNDA

PLN Usul TDL

Naik 30-80%

▶ **JAKARTA** – PT PLN mengajukan tiga skenario kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri, yakni 30%, 50%, dan 80%. Sementara itu, para pengusaha meminta kenaikan tarif listrik dilakukan setelah pemerintah menetapkan kebijakan energi nasional dan PLN diaudit secara menyeluruh.

Sejumlah kalangan menilai pemerintah dan PLN harus memperbaiki manajemen energi, sebelum mengumumkan rencana kenaikan tarif listrik. Apalagi, PLN dinilai masih belum efisien, bahkan diperkirakan inefisiensi mencapai 25%.

Demikian rangkuman wawancara dengan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi, Sekjen Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman, Ketua Apindo Djimanto, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga S Uno. Mereka dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (16/7).

“Pengusaha telah diundang PLN dua kali, untuk mendengarkan paparan simulasi kenaikan tarif listrik industri sebanyak 30%, 50%, dan 80%. PLN beralasan subsidi yang di-

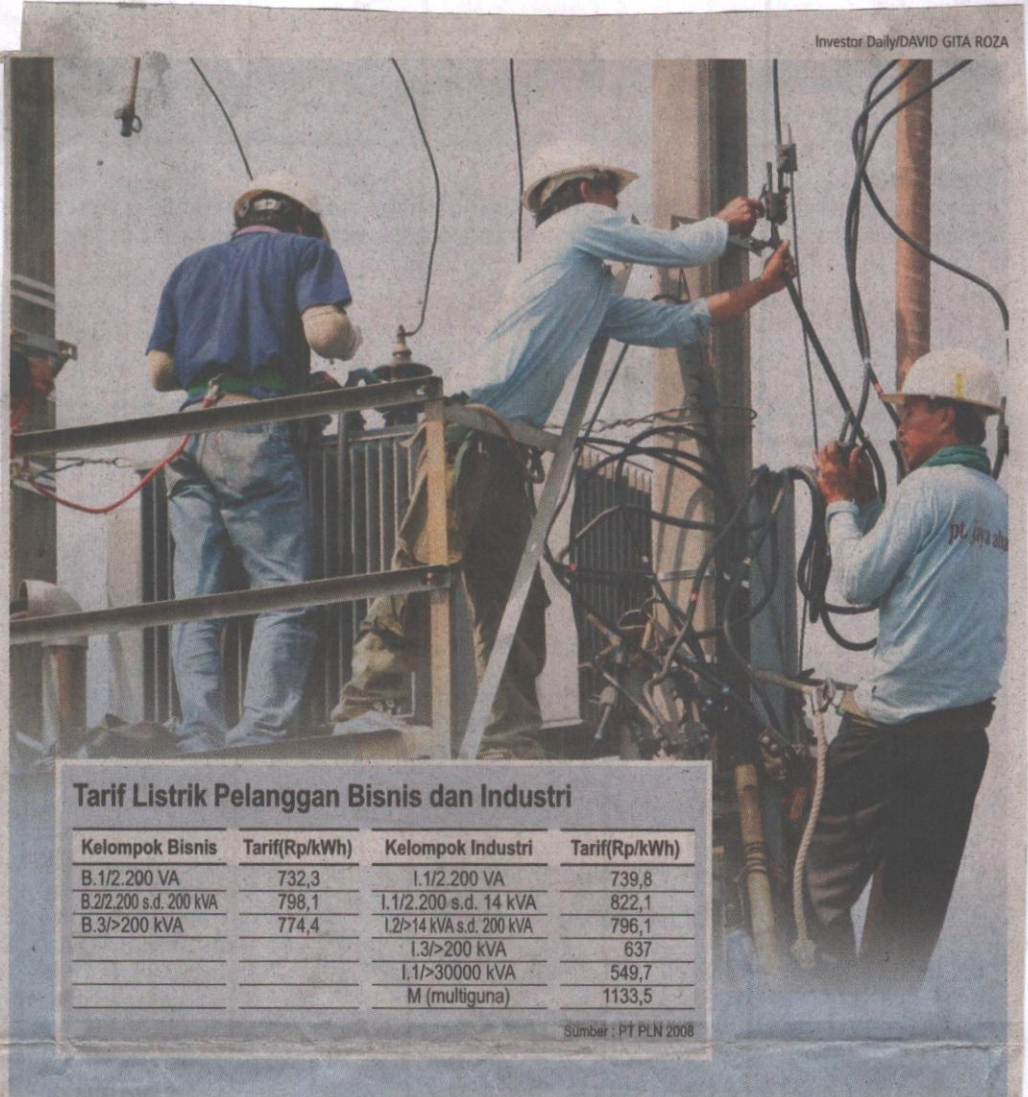
jatah untuk 2008 hanya cukup untuk keperluan delapan bulan,” ujar Ernovian.

Alasan lain, PLN kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk pembangkitnya, terutama batubara. Selain itu, harga batubara juga melonjak tidak menentu, sehingga arus kas perusahaan terganggu. Selama ini, sekitar 80% batubara diekspor dan sisanya 20% untuk pasar domestik.

Ernovian dan Sofjan Wanandi menegaskan, alasan maupun rencana PLN untuk menaikkan tarif listrik tidak bisa diterima. Mereka meminta rencana itu ditunda.

“Sebagian besar pengusaha tidak setuju PLN menaikkan tarif listrik. Kami tidak mau PLN mendapat untung, sedangkan kami bangkrut,” tegas Sofjan.

Apalagi, kata Sofjan, PLN tidak berhak menegosiasikan sendiri kenaikan tarif listrik dengan industri. Menurut dia, UU Ketenagalistrikan menetapkan bahwa kenaikan tarif listrik harus dilakukan dengan kesepakatan pe-



Tarif Listrik Pelanggan Bisnis dan Industri

Kelompok Bisnis	Tarif(Rp/kWh)	Kelompok Industri	Tarif(Rp/kWh)
B.1/2.200 VA	732,3	I.1/2.200 VA	739,8
B.2/2.200 s.d. 200 kVA	798,1	I.1/2.200 s.d. 14 kVA	822,1
B.3/>200 kVA	774,4	I.2/>14 kVA s.d. 200 kVA	796,1
		I.3/>200 kVA	637
		I.1/>30000 kVA	549,7
		M (multiguna)	1133,5

Sumber : PT PLN 2008

Menurut Ernovian, pihaknya mendapat informasi dari sumber di PLN bahwa BUMN itu masih bisa meningkatkan efisiennya hingga 25%. Untuk persoalan lain, seperti kesulitan mendapatkan pasokan batubara, manajemen PLN perlu meminta bantuan ke pemerintah, sehingga ada kebijakan mewajibkan perusahaan pertambangan memasok kebutuhan pasar dalam negeri.

Selain itu, lanjut Ernovi-

an, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan retribusi yang dipatok pemerintah daerah perlu diturunkan.

Penurunan ini bisa untuk menutup kenaikan biaya penyediaan listrik PLN, sehingga total tagihan pelanggan tidak perlu naik.

Ia menjelaskan, sebenarnya tarif listrik dari PLN sudah cukup kompetitif dibandingkan negara lain, yakni sekitar US\$ 4-5 sen per kWh. Namun, tambahan PPJU dan retribusi mem-

buat total tagihan ke pelanggan mencapai US\$ 8 sen per kWh, atau naik 100% dari harga listrik PLN. Untuk listrik dengan daya 600 kVA, pelanggan kena PPJU sekitar Rp 70 juta.

Menurut Sofjan, Jumat (18/7) pagi, pihaknya akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap soal rencana PLN menaikkan tarif listrik.

Siangnya, keputusan asosiasi bakal dibawa pada pertemuan dengan PLN.

Sedangkan Budi Susanto Sadiman mengatakan, kenaikan tarif listrik yang dapat ditoleransi perusahaan petrokimia hanya sekitar 50-60% atau menjadi Rp 900 per kWh. "Itu masih kompetitif bagi industri petrokimia nasional. Kenaikan itu hanya menambah 2-6% ongkos produksi," katanya. Namun, dengan kenaikan tarif, PLN perlu menjamin tidak akan ada pemadaman lagi.

Direktur Jawa-Madura-Bali (Jamali) PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, sebenarnya PLN tidak pernah membicarakan kenaikan tarif listrik bagi industri. Kenaikan tarif listrik merupakan domain pemerintah.

"Kami ketika bertemu dengan pengusaha hanya membahas soal keterbatasan daya PLN. Nah, di tengah jalan, ada usulan dari pengusaha untuk menaikkan tarif listrik sebagai solusi membantu PLN," kata Murtaqi.

Menurut Murtaqi, estimasi skenario kenaikan tarif listrik yang dilontarkan pengusaha mungkin dihitung dari selisih harga jual dengan biaya pokok penyediaan (BPP) sebesar Rp 670 per kWh.

Sementara, anggota komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, audit pembangkit listrik perlu dilakukan, karena yang terjadi saat ini adalah krisis sumber energi ditambah krisis pembangkit. Menurut dia, krisis sumber energi menyumbang 70% masalah listrik nasional. Sisanya, 30%, merupakan merupakan krisis pembangkit listrik.

Daya Saing Industri

Sementara itu, MS Hidayat mengatakan, industri dipastikan makin sulit bersaing di pasar global jika kenaikan tarif listrik terlampaui tinggi. Ia menjelaskan, Kadin dan PLN sudah melakukan kajian awal tentang berbagai skema guna mengatasi defisit pasokan listrik di dalam negeri, dan masih menegosiasikan kenaikan tarif listrik yang tidak membebankan kedua pihak.

Sandiaga Uno menambahkan, rencana kenaikan tarif listrik yang digodok Kadin dan PLN perlu mengatur secara khusus keringanan untuk industri kecil dan menengah (IKM). Alasannya, IKM-lah yang paling dirugikan dengan seringnya pemadam-

an listrik belakangan ini.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhamad Lutfi, kenaikan tarif listrik untuk industri akan membuat investasi listrik di Indonesia menjadi menarik. Saat ini, lanjutnya, Indonesia menjual listrik US\$ 7 sen per kWh, sedangkan di Singapura US\$ 19 sen.

SKB Berlaku 31 Juli

Sementara itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri tentang pengalihan jam kerja industri akan berlaku efektif mulai 31 Juli 2008, mundur dari keputusan sebelumnya 21 Juli.

"Selama 21-30 Juli 2008, PLN akan melakukan sosialisasi SKB ke industri-industri. Nanti kalau buru-buru, ramai lagi. Kami yakin implementasi SKB akan berjalan baik asalkan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan industri," kata Direktur Jamali PLN Murtaqi Syamsuddin.

SKB yang ditandatangani Senin (14/7) itu mewajibkan seluruh industri di Jawa dan Bali-kecuali skala kecil-menengah—untuk mengalihkan dua hari kerja operasi ke hari Sabtu-Minggu setiap bulan.

Saat ini terdapat 6.800 pelanggan industri di sistem ke-listrikan Jawa-Bali dengan dengan total daya 8.500 MW.

Untuk itu, kata Dirut PLN Fahmi Mochtar, PLN akan mengelompokkan pelanggan industri dalam 12 cluster berdasarkan wilayah distribusi PLN. Nantinya, setiap cluster industri harus mampu mengurangi pemakaian listrik sekitar 50 MW. Dengan demikian, industri mampu mengurangi konsumsi listrik harian sebesar 600 MW, sesuai target PLN dengan penerapan SKB.

Fahmi menambahkan, setiap PLN akan membuat jadwal pengalihan industri yang harus mengalihkan dua hari kerja. "Pola pengaturannya akan dibicarakan dengan industri, apakah dari hari Senin kemudian dipindah menjadi hari Sabtu terus. Kemudian hari Selasa dipindah ke hari Minggu terus," ujarnya.

Fahmi mengungkapkan pula bahwa subsidi listrik PLN tahun ini akan membengkak jadi Rp 89,3 triliun, dari perkiraan awal Rp 62,5 triliun. Pembengkakan terjadi karena konsumsi listrik tahun ini tumbuh 5%.

Kenaikan subsidi Rp 26,8 triliun tersebut setara dengan pemadaman listrik setiap hari sebesar 1.150 MW.

(pya/her/c122)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 4

TAHUN 20

Oleh Ahmad Erani Yustika*

Elektrifikasi dan Defisit Listrik

▶ Pemadaman dan penggiliran pemakaian listrik (khususnya untuk sektor industri) akhirnya benar-benar terjadi.

Di luar soal kepastian usaha dan aneka masalah ekonomi lainnya, problem penyediaan infrastruktur (listrik) menjadi faktor penting kegiatan penanaman modal (investasi). Dengan begitu, seringnya pemadaman aliran listrik merupakan salah satu kendala utama bagi aktivitas sektor riil, sekaligus menjadi determinan penting yang menghambat laju investasi di Indonesia.

Selain sektor industri dan aktivitas bisnis, rumah tangga juga sering mengalami ekkses dari keterbatasan energi listrik tersebut. Tampaknya, persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat karena investasi penambahan pasokan listrik memakan waktu beberapa tahun. Bahkan, penambahan 10.000 megawatt listrik yang sudah dimulai tahun lalu baru akan selesai pada 2010. Dalam situasi yang seperti ini, kebijakan apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasinya?

Rasio Elektrifikasi

Data-data yang ada sampai dengan akhir 2006 menyebutkan bahwa total produksi listrik di Indonesia sebesar 133 ribu gigawatt. Suplai ini sebenarnya masih lebih tinggi daripada konsumsi listrik nasional yang sebesar 112 ribu gigawatt. Tetapi akibat total produksi listrik tersebut bukan

seluruhnya diproduksi oleh PLN, menyebabkan pengelolaan yang tidak optimal.

Sekadar gambaran, dari total produksi listrik tersebut, yang diproduksi sendiri oleh PLN hanya sebesar 101,66 ribu gigawatt atau sekitar 76%, sedangkan lainnya harus dicukupi dari pembelian pihak ketiga. Berpijak pada realitas ini, sebenarnya neraca listrik nasional mulai 2003 - 2006 selalu mengalami defisit. Sampai saat ini, secara agregat rasio elektrifikasi per kapita di Indonesia sebesar 508,43 kilowatt (2006). Rasio ini mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, di mana secara berturut-turut mulai 2003 - 2005 sebesar 422,87 kilowatt; 462,53 kilowatt, dan 488,86 kilowatt.

Secara lebih detail, sektor industri dan rumah tangga merupakan dua sektor yang paling banyak mengisap aliran listrik. Bila pada 2002 - 2005 sektor industri menyedot listrik paling banyak, secara berurutan sebanyak 36,59 ribu gigawatt (42%); 36,5 ribu gigawatt (40,35%); 40,32 ribu gigawatt (40,28%); dan 42,45 ribu gigawatt (39,66%); maka pada 2006 sektor rumah tanggalah yang paling banyak menerima aliran listrik, yakni sebesar 43,75 ribu gigawatt (39,85%) [PLN, 2007].

Namun, dari sisi rasio



■ Ahmad Erani Yustika

kaian per unit, sektor industri tetap pengisap utama aliran listrik. Sebagai ilustrasi, pada 2006 rata-rata satu unit industri mengonsumsi listrik sebanyak 948 ribu kilowatt setiap tahunnya. Sedangkan rumah tangga dan aktivitas bisnis lainnya pada 2006 rata-rata per unitnya mengon-

Bila sektor industri di Indonesia diekspektasikan sebagai kontributor penting PDB, maka satu unit industri di Indonesia minimal harus disediakan pasokan listrik sebesar 1,33 juta kilowatt/tahun.

sumsi 1.321 kilowatt dan sekitar 11 ribu kilowatt.

Jika dibandingkan dengan AS, sampai akhir 2006 total konsumsi listrik di sana sebesar 3,66 juta gigawatt, atau lebih dari 30 kali lipat konsumsi Indonesia. Data ini memang tidak kompatibel jika dilihat secara umum, namun bila dipandang berdasarkan rasio rata-rata elektrifikasi per segmen, tingkat konsumsi listrik di AS itu dapat dijadikan acuan.

Rasio rata-rata elektrifikasi rumah tangga per unit di AS sebesar 11.040 kilowatt, jauh di atas rasio elektrifikasi ru-

mah tangga di Indonesia yang hanya 1.321 kilowatt. Sedangkan untuk rasio elektrifikasi industri di AS sebesar 1,33 juta kilowatt atau sekitar 1,4 kali lipat rasio elektrifikasi industri di Indonesia yang sebesar 948 ribu kilowatt.

Dengan begitu, bila sektor industri di Indonesia diekspektasikan sebagai kontributor penting PDB, maka satu unit industri di Indonesia minimal harus disediakan pasokan listrik sebesar 1,33 juta kilowatt/tahun. Jadi, data di atas menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi di Indonesia masih sangat rendah.

Momentum Pembangunan

Walaupun dari sisi permintaan listrik di AS sangat tinggi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara mutlak oleh do-

mestik. Pasalnya, setelah mengalami peningkatan permintaan listrik yang sangat drastis pada 1970-an, segera Kongres AS sepakat melakukan deregulasi atas pasar listrik di AS, sehingga pascakebijakan tersebut sektor privat dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik (Kamerschen *et. al.*, 2005).

Struktur pasar listrik yang demikian ini juga terjadi di negara-negara lain, misalnya di Australia. Deregulasi pasar listrik di Australia bertonggak pada 1991, yang kala itu untuk mencapai keseimbangan antara permintaan ideal pasar listrik

dengan penawarannya, pemerintah (melalui BUMN-nya) melakukan kerja sama dengan sektor swasta, terutama dalam pengadaan pembangkit tenaga listrik (*generation*), transmisi (*transmission*), distribusi, dan penjualan (*retail*) [Abbott, 2006]. Publikasi itu juga mewartakan bahwa pascakebijakan tersebut terjadi keseimbangan pasar listrik di Australia.

Bila mengacu kepada kebutuhan listrik yang ideal di AS, saat ini di Indonesia dibutuhkan pasokan listrik sekitar 552 juta megawatt/tahun (rumah tangga sebesar 365 juta megawatt, industri sebesar 61 juta megawatt, dan sebesar 125 juta untuk aktivitas bisnis). Hal ini bila dikaitkan dengan tingkat penawaran listrik oleh PLN, maka jelas kebutuhan listrik yang ideal ini sulit dipenuhi oleh PLN.

Berpijak pada kebutuhan itu, maka pembangunan pembangkit listrik (terutama dengan bahan bakar nonminyak) secara massal harus segera dieksekusi. Di luar itu, partisipasi sektor swasta perlu dibuka seluas-luasnya sebagai mitra dan kompetitor PLN, sehingga proses penambahan pasokan listrik bisa lekas tercapai. Tentu saja dibutuhkan regulasi yang relatif ketat agar akses masyarakat tidak menyempit dan harga jual listrik tidak lebih mahal setelah sektor swasta terlibat dalam sektor kelistrikan ini. Skenario ini mesti dipertimbangkan jika negara tidak ingin kehilangan momentum pembangunan. □

► Penulis adalah Direktur Eksekutif Indef dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 2

TAHUN

■ PENGALIHAN HARI KERJA

Tak Ada Insentif Jika Tarif Listrik Tidak Naik

JAKARTA. Keinginan pengusaha yang wajib beralih hari kerja ke Sabtu dan Minggu, untuk mendapatkan insentif tarif listrik bakal mental. Pasalnya, PLN baru mau memberi insentif bila harga jual listrik ke industri naik terlebih dahulu. Padahal menaikkan tarif listrik itu bukan perkara gampang. "Tidak mungkin memberikan insentif dengan tarif listrik yang sekarang. Enggak *make sense*," kata Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (16/7).

Kalau pengusaha setuju tarif dasar listrik (TDL) naik sesuai harga keekonomian atau sedikit di bawahnya, PLN bersedia memberikan insentif. Asal tahu saja, TDL dari PLN saat ini terbilang murah karena masih mendapat subsidi dari negara.

Para pengusaha ramai-ramai menyuarkan permintaan insentif tarif listrik ini. Salah satunya ialah pengusaha Rahmat Gobel. Alasan Rahmat, pemerintah juga menerapkan sanksi berupa pemutusan aliran listrik ke perusahaan tidak mau mengalihkan

hari kerja. Jadi, logika Rahmat, ada sanksi, maka ada insentif.

Tak mau disibukkan oleh permintaan pengusaha soal insentif, PLN terus menyiapkan pelaksanaan program ini. Saat ini PLN masih mendata industri yang bakal wajib beralih di berbagai daerah di Jawa dan Bali.

Sesuai permintaan pemerintah, PLN melakukan pendataan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota. "Tanggal 21 Juli pemerintah daerah harus mengeluarkan data tentang kelompok industri mana saja yang wajib beralih," kata Direktur Sistem PLN Jawa, Bali, dan Madura Murtaqi Syamsuddin.

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri soal pengalihan hari kerja ini wajib dilaksanakan pada Agustus nanti. Pengalihan hari kerja ke Sabtu dan Minggu karena pada dua hari itu, PLN mengalami surplus listrik. Namun pengusaha masih menanti kejelasan jadwal pelaksanaan program ini.

Martina Prianti, Sanny Cicilia

4

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HALAMAN : 15

TAH

PLN Bagi 12 Kelompok Pelanggan Industri

JAKARTA— PT PLN (Persero) mengelompokkan pelanggan industri dalam 12 *cluster* (kelompok). Pengelompokan ini terkait dengan kebijakan pemerintah menggeser beban hari kerja ke Sabtu dan Minggu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menuturkan, pengelompokan pelanggan industri menjadi 12 *cluster* ini dilakukan berdasarkan wilayah distribusi PLN. Dua belas kelompok ini, jelasnya, akan didistribusikan untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Nantinya kita buat jadwal dalam satu bulan itu setiap industri bisa terkena pengalihan hari kerja dua kali," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (16/7).

Ia menerangkan, setidaknya PLN butuh mengurangi beban pemakaian harian sekitar 600 megawatt (MW).

Dengan pembagian pelanggan industri menjadi 12 *cluster*, maka setiap *cluster* industri harus bisa mengurangi pemakaian listriknya sekitar 50 MW.

"Pola pengaturannya kita akan bicarakan lagi dengan industri, apakah dari hari Senin kemudian dipindah menjadi ke hari Sabtu terus. Kemudian hari Selasa dipindah ke hari Minggu terus," paparnya.

Subsidi 2008

Sementara itu PLN memperkirakan subsidi listrik pada tahun ini akan membengkak menjadi Rp 89,3 triliun dari perkiraan semula sebesar Rp 62,5 triliun.

Pembengkakan kebutuhan subsidi listrik ini, jelas Fahmi, karena konsumsi listrik hingga akhir tahun diperkirakan tumbuh 5 persen atau sebesar 129.495 gigawatt-hour (Gwh). Angka ini lebih tinggi dari asumsi awal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 2008 sebesar 1,9 persen atau sebesar 121.289 Gwh.

Sementara asumsi patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari sebelumnya 95 dolar AS per barel menjadi 120 dolar AS per barel. Sedangkan patokan harga batu bara naik dari Rp 521 per kilogram (kg) menjadi Rp 800 per kg.

Tambahan subsidi Rp 26,8 triliun ini, menurut Fahmi, setara dengan penyediaan listrik sebesar 20,1 terawatt-hour (TWh). "Bila kita tetap mengacu kepada basis RKAP 2008, tambahan subsidi Rp 26,8 triliun ini identik dengan kita harus mengatur pemadaman setiap hari sekitar 1.150 MW," paparnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi mengungkapkan rencana PLN untuk menaikkan tarif listrik bagi pelanggan industri dan bisnis, tidak akan mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, menurut dia, tarif listrik di Indonesia masih kompetitif dengan negara-negara lain. ■ dia